

TESIS

**EVALUASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM
SANITASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT
DI KOTA BELOPA**

Diajukan oleh

WIWI SYARIF

MPW4513008



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kota Belopa
2. Nama Mahasiswa : Wiwi Syarif
3. NIM : MPW4513008
4. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc

Pembimbing II

Prof. Dr. Batara Surya, ST, M.Si

Mengetahui:

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Munlis Ruslan, SE, M.Si

Ketua Program Studi PWK

Prof. Dr. Batara Surya, ST, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/ Tanggal :
Tesis Atas Nama : **Wiwi Syarif**
NIM : **MPW4513008**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

BOSOWA

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc (.....)

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST, M.Si (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. Tommy S.S Eisenring, M.Sc (.....)

2. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S (.....)

Makassar,

2018



Dr. Muhtis Ruslan, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : **WIWI SYARIF**

NIM : **MPW4513008**

Menyatakan bahwa tesis ini yang berjudul Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kota Belopa, adalah merupakan hasil karya sendiri.

Seluruh ide dan gagasan yang ada dalam Tesis ini adalah merupakan ide dan gagasan saya sendiri, kecuali beberapa referensi dari berbagai sumber, baik media cetak maupun elektronik (internet), serta kutipan dan informan.

Jika pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang di tetapkan oleh Universitas Bosowa Makassar.

Makassar,

2018



WIWI SYARIF

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **”Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kota Belopa”** Tesis ini merupakan persyaratan akademik dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Megister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ir. Mary Selitung, M. Sc**, selaku pembimbing I dan Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si**, selaku pembimbing II dan Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, yang penuh kearifan, ketulusan dan kesabaran memberikan petunjuk dan bimbingan dari awal sampai akhir selesainya tesis ini.
2. Bapak **Dr. Muhlis Ruslan, SE, M. Si** selaku Direktur Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar .
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Tommy S. S. Eisenring, M. Si** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. A. Muhibudin, M. Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang positif dalam penyusunan tesis ini.
4. Ayahanda **H. MA. Syarifuddin**, ibunda **Almah. Hj. Hidayah**, suamiku **Muh. Hatta**. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat dan motivasinya. Ananda tercinta **Alm. Kinayah Aqilah Arsyarif**

5. **Muh. Hatta**, atas segala motivasi, perhatian dan doanya.
6. Seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf** pada Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
7. Teman-teman Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar Angkatan 2013.
8. Rekan-rekan **Dinas Perkim Kab. Luwu** dan **BAPPEDA Kab .Luwu, Pemerintah Desa Belopa dan Desa Paconne, VW ADEM Studio.**
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dengan keterbatasan pengalaman ilmu maupun pustaka yang di tinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna.

Makassar, 2018

PENULIS

ABSTRAK

Pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi yang dimiliki. Partisipasi masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2018 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada program sanitasi lingkungan dan analisa uji korelasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota belopa.

Hasil analisis dan pembahasan mengidentifikasi pengaruh partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk keahlian, dan keterlibatan dalam kegiatan fisik, serta efektivitas pelaksanaan program sanitasi dari sisi ketersediaan sarana. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Belopa cenderung belum berjalan maksimal. Pelibatan masyarakat secara aktif dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap pasca konstruksi, khususnya dalam operasi dan pemeliharannya sangat menentukan penilaian keberhasilannya, sehingga prasarana sanitasi yang dibangun tetap terpelihara dengan dukungan masyarakat.

Kata kunci : Sanitasi Lingkungan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The implementation of the community-based environmental sanitation program is an effort to make the community independent through the realization of its potential. Community participation always involves two interrelated groups, namely the community as the empowered party and the concerned party as the empowering party. Minister of Health Regulation No. 3 of 2018 concerning Community-Based Total Sanitation aims to realize hygienic and sanitary community behavior independently in order to improve the health status of the community as high as possible.

This study aims to examine and analyze the effectiveness of the implementation of the environmental sanitation program in Belopa City and the effect of community participation on the implementation of the environmental sanitation program in Belopa City. This study uses a quantitative descriptive approach using descriptive statistical analysis to determine community participation in the environmental sanitation program and correlation test analysis to determine the effectiveness of the implementation of environmental sanitation programs in Belopa City.

The results of the analysis and discussion identify the influence of community participation, namely participation in the form of labor, participation in the form of expertise, and involvement in physical activities, as well as the effectiveness of the implementation of the sanitation program in terms of the availability of facilities. The influence of community participation on the implementation of community-based environmental sanitation programs in Belopa City tends not to run optimally. Active community involvement from the beginning of the implementation to the post-construction stage, particularly in its operation and maintenance, will determine the success of the assessment, so that the sanitation infrastructure built is maintained with the support of the community.

Keywords: Environmental Sanitation, Community Participation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Lingkup Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perencanaan Partisipatif (<i>Participatory Planning</i>)	10
1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency).....	12
2. Teori Sistem (The Social System).....	13
3. Teori Mobilisasi Sumberdaya	14
B. Partisipasi Masyarakat.....	14

1. Tujuan Partisipasi Masyarakat	16
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat	17
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat	20
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	21
5. Hambatan Dalam Partisipasi Masyarakat	23
C. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	25
1. Sanitasi Lingkungan	26
2. Konsep Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	27
3. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	29
4. Kepedulian Masyarakat Merujuk pada Sikap dan Perilaku	35
D. Kajian Penelitian Sebelumnya.....	38
E. Kerangka Pemikiran Studi	42
F. Proposisi Penelitian	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	48
C. Populasi Dan Sampel	49
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	53
G. Definisi Operasional.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu.....	58
--------------------------------------	----

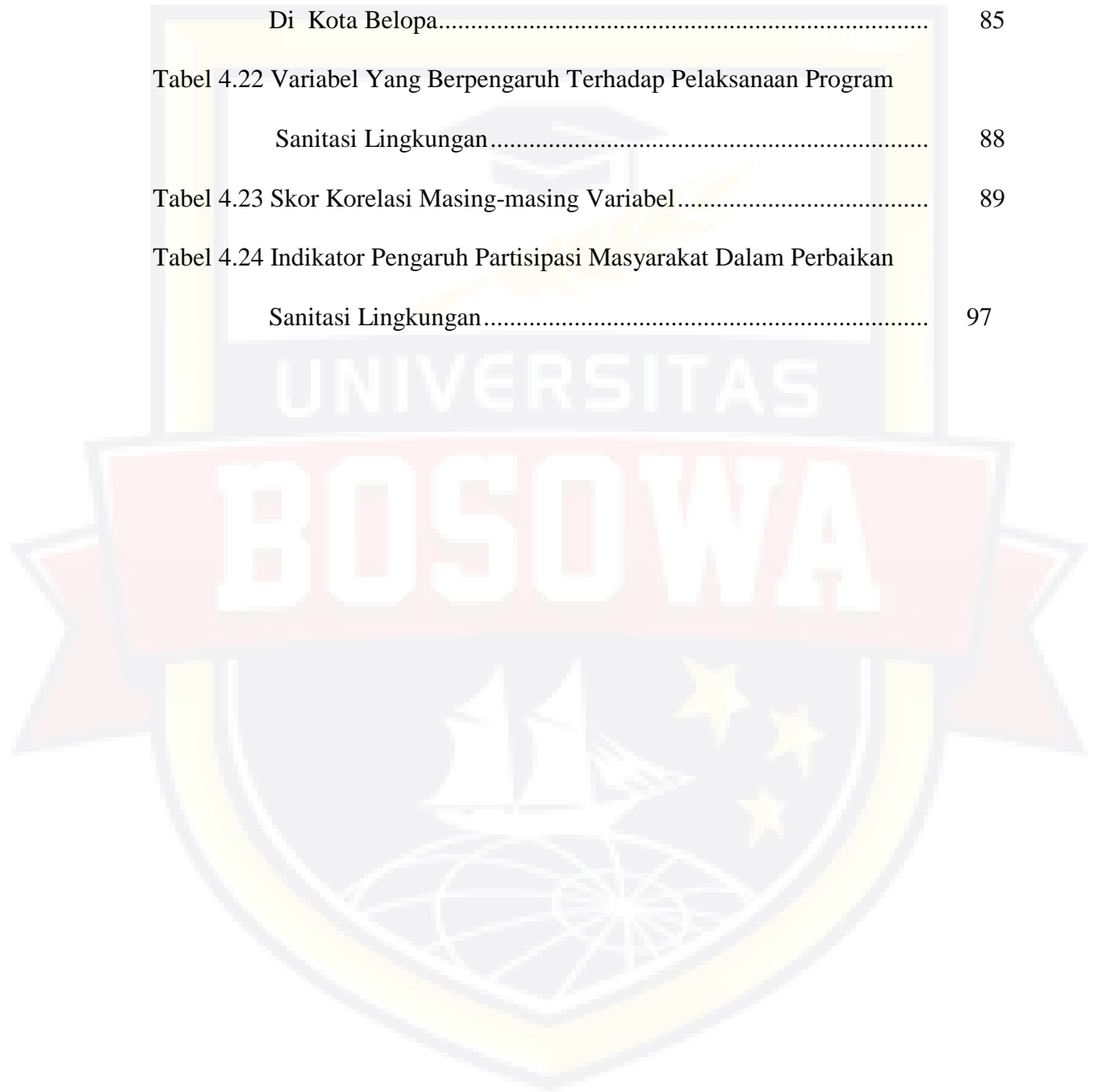
B. Gambaran Umum Kota Belopa	61
1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	61
2. Topografi dan Kemiringan Lereng.....	63
3. Kondisi Kependudukan	64
4. Klasifikasi Penggunaan lahan	66
5. Prasarana Transportasi (Jaringan Jalan).....	68
C. Sanitasi Lingkungan Kota Belopa.....	69
1. Cakupan Pelayanan Sanitasi Kota Belopa	69
2. Program SLBM di Kota Belopa.....	70
3. Kondisi Prasarana Sanitasi Di Kota Belopa.....	71
D. Karakteristik Responden	73
1. Jenis Kelamin Responden	73
2. Usia Responden.....	74
3. Tingkat Pendidikan Responden.....	74
4. Jenis Pekerjaan Responden	75
E. Deskripsi Responden Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa	76
1. Keterlibatan Masyarakat	77
2. Karakteristik dan Perilaku Masyarakat	77
3. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Tenaga	78
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Pikiran.....	79
5. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Keahlian.....	80
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Materi	81

7. Kehadiran dalam Pertemuan	82
8. Keterlibatan dalam Kegiatan Fisik	83
9. Keaktifan Dalam Diskusi	83
10. Keanggotaan dalam Organisasi	84
F. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa	88
G. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepedulian Masyarakat Dalam Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa	90
1. Sebelum Ada Program Perbaikan Sanitasi Lingkungan	91
2. Sesudah Ada Perbaikan Sanitasi Lingkungan	93
H. Sintesis Hubungan Antara Peran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perbaikan Sanitasi Lingkungan.....	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah populasi dan sampel	51
Tabel 3.2 Kebutuhan Data Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Luwu Dirinci Berdasarkan Kecamatan.....	59
Tabel 4.2 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa	63
Tabel 4.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Belopa	65
Tabel 4.4 Klasifikasi Tutupan Lahan di Kota Belopa.....	66
Tabel 4.5 Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Belopa	69
Tabel 4.6 Sistem Penanganan Air Limbah Kota Belopa.....	70
Tabel 4.7 Jenis Kelamin Responden	73
Tabel 4.8 Usia Responden.....	74
Tabel 4.9 Tingkat Pendidikan Responden	75
Tabel 4.10 Jenis Pekerjaan Responden	76
Tabel 4.11 Keterlibatan Masyarakat Terhadap Sanitasi Lingkungan	77
Tabel 4.12 Karakteristik dan Perilaku Masyarakat	78
Tabel 4.13 Keterlibatan Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga	79
Tabel 4.14 Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Pikiran	80
Tabel 4.15 Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Keahlian	80
Tabel 4.16 Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Materi	81
Tabel 4.17 Kehadiran dalam Pertemuan	82
Tabel 4.18 Keterlibatan dalam Kegiatan Fisik.....	83
Tabel 4.19 Keaktifan Dalam Diskusi	84

Tabel 4.20 Keanggotaan dalam Organisasi.....	84
Tabel 4.21 Rekapitulasi Efektivitas Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa.....	85
Tabel 4.22 Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan.....	88
Tabel 4.23 Skor Korelasi Masing-masing Variabel.....	89
Tabel 4.24 Indikator Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Lokasi Penelitian	8
Gambar2.1 Kerangka Pikir.....	45
Gambar4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu.....	60
Gambar4.2 Peta Administrasi Kota Belopa	62
Gambar4.3 Peta Penggunaan Lahan Kota Belopa	67
Gambar4.4 Kondisi Hunian Masyarakat.....	70
Gambar4.5 Kondisi Sarana Sanitasi Masyarakat.....	71
Gambar4.6 Kondisi Pembuangan Limbah Rumah Tangga Masyarakat.....	72
Gambar 4.7 Diagram Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Masyarakat ..	91
Gambar 4.8 Faktor Pendorong Masyarakat Mengelola dan Memanfaatkan Sarana Sanitasi	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005 : 87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *“people centred, participatory, empowering and sustainable”* Chambers 1995 dalam Utama Pranata 2012 : 16. Konsep ini lebih luas hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety*

need). Partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi yang dimiliki. Adapun partisipasi masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pelibatan masyarakat secara aktif dari awal pelaksanaan sampai dengan tahap pasca konstruksi (*bottom up*), khususnya dalam operasi dan pemeliharannya sangat menentukan penilaian keberhasilannya, sehingga prasarana sanitasi yang dibangun tetap terpelihara dengan dukungan masyarakat. Sebaliknya pembangunan prasarana sanitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini dianggap sebagai proyek 'pemberian' saja, karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh (*top down*). Akibatnya masyarakat merasa tidak turut memiliki prasarana sanitasi yang telah dibangun karena merasa tidak punya andil di dalamnya.

Sarana sanitasi lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Belopa menjadi salah satu konsentrasi terbesar, sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu (2012), mempunyai masalah sanitasi buruk dengan kondisi sangat memprihatinkan. Artinya system sanitasinya yang cenderung mencemari lingkungan. Kondisi tempat tinggal yang buruk, menurunnya kualitas infrastruktur jalan, drainase akibat genangan pasang surut air laut setiap bulannya serta pembuangan air limbah yang langsung dialirkan pada saluran/sungai, menyebabkan pendangkalan saluran/sungai, tersumbatnya

saluran/sungai karena sampah sehingga pada saat musim penghujan selalu terjadi banjir dan menimbulkan penyakit.

Dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kota Belopa sebagian besar masyarakat masih menggunakan sistem *on site* (setempat) serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan sistem komunal untuk pengelolaan *black water*. Sedangkan untuk *grey water* sebagian besar rumah tangga masih melakukan pembuangan ke lahan terbuka, drainase, saluran irigasi, bahkan kesungai. Kabupaten Luwu saat ini pengelolaan *black water* (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) belum berfungsi secara maksimal dimana tidak pernah dilakukan penyedotan lumpur tinja skala rumah tangga.

Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun memperburuk kondisi yang sudah ada. Proses perencanaan sampai dengan pembangunan prasarana sanitasi yang dilakukan kurang mengakomodir keinginan dan urgensi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek pembangunan, seringkali hanya menjadi objek pembangunan. Akibatnya prasarana sanitasi yang dibangun pemerintah menjadi mubazir, karena tidak dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, dan hanya menjadi proyek 'monumental' saja.

Kota Belopa masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang

relative masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan, serta belum begitu mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Atas dasar itu, sosialisasi penyadaran masyarakat penting, baik melalui jalur formal maupun informal. Pemerintah Kota Belopa sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi ini melalui program-program perbaikan lingkungan permukiman dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Namun pada kenyataannya tidak semua program dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan tidak semua masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi melalui program sanitasi lingkungan. Namun kenyataannya, sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang optimal, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana yang sudah terbangun. Mustofa dalam (Beata Ratnawati 2012 : 18) mengemukakan bahwa kapasitas masyarakat dan sumber daya alam dalam pengelolaan prasarana masih cukup rendah untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan prasarana yang dibangun. Masyarakat masih beranggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeliharaan adalah pihak pemerintah atau lembaga yang dibentuk, sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk tidak melakukan pengawasan dan pemeliharaan.

Guna mewujudkan pembangunan prasarana yang efisien dan efektif, maka mulai dari perumusan rencana harus melalui kesepakatan antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan masyarakat sebagai pengguna. Untuk penyelesaian masalah sanitasi kota, maka pendekatan yang perlu digunakan adalah pendekatan partisipasi masyarakat, sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya kualitas lingkungan (Dokhikah Y dan Dewi, 2007). Kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman (domestik) di masa yang akan datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, memerlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai yang dapat melindungi sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah baik yang berasal dari aktifitas rumah tangga maupun industri rumah tangga, sehingga diperlukan kebijakan untuk perbaikan sekaligus peningkatan akses sanitasi masyarakat perkotaan yang tepat sasaran dan tepat kebutuhan.

Latar belakang masalah tersebut di atas, menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kota Belopa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan di Kota Belopa?

2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.
2. Mengkaji dan menganalisis pengaruh peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Guna Laksana

Penelitian ini sangat berguna khususnya untuk Pemerintah Kab. Luwu sebagai bahan masukan dalam penyusunan konsep-konsep program sanitasi lingkungan terkait dengan peran serta masyarakat sebagai kunci sukses pembangunan untuk masa sekarang serta dimasa yang akan datang.

2. Aspek Keilmuan

Penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan khususnya Perencanaan Wilayah dan Kota, terkait dengan kebijakan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kota Belopa serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup substansial dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansial adalah batasan penjelasan atas pokok/inti dari topik penelitian. Sedangkan ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah/lokasi yang menjadi objek penelitian.

1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansi penelitian disesuaikan dengan sasaran penelitiannya itu terdiri atas :

- a) Kajian efektivitas pelaksanaan program terhadap perbaikan sanitasi lingkungan di Kota Belopa. Pada aspek ini akan dibahas tentang efektivitas peran serta masyarakat yang dilatar belakangi oleh keterlibatan masyarakat, karakteristik perilaku masyarakat Kota Belopa, sebelum dan sesudah program sanitasi lingkungan dilaksanakan dan adaptasi yang dilakukan masyarakat terkait dengan peran atau aktivitas sehari-hari dari masyarakat tentang pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan program sanitasi lingkungan. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait peraturan-peraturan tentang sanitasi lingkungan, dan peran serta Stakeholder dalam menyukseskan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.
- b) Kajian bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan. Kriteria penentu dari literatur tentang kepedulian yang merujuk kepada sikap dan perilaku menempatkan diri sendiri dalam konteks kepentingan yang lebih luas, berusaha untuk

memperhatikan kepentingan pihak lain berdasarkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

2. Ruang Lingkup Spasial

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Belopa Kabupaten Luwu, yang menjadi salah satu lokasi pembangunan fisik program sanitasi lingkungan tahun 2013. Kota Belopa adalah satu daerah yang berada di kawasan Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara dengan batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kamanre, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan Kecamatan Suli, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajo.



Gambar 1.1. Lokasi Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian baik ruang lingkup wilayah penelitian maupun ruang lingkup materi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan kajian literatur dan teori yang terkait dengan kajian program sanitasi lingkungan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sanitasi lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai pendekatan penelitian, data penelitian dan analisis data yang digunakan untuk meneliti efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa. Serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan karakteristik dan gambaran umum Kabupaten Luwu, Kota Belopa dan Sanitasi Lingkungan di Kota belopa dan hasil analisis terkait efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa. Serta pengaruh peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning*)

Participatory Planning (Perencanaan Partisipatif) adalah paradigma, atau teori tentang perencanaan kota yg menekankan pada keterlibatan dari semua komponen masyarakat dalam proses manajemen strategis, atau dalam proses perencanaan pada tingkat komunitas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagai teori dalam ranah perencanaan, *Participatory Planning* berasumsi bahwa kegiatan perencanaan kota atau pembangunan masyarakat. Proses penyusunan dan implementasi perencanaan (Community development) hanya akan efektif apabila seluruh komponen masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi perencanaan.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach). Model perencanaan partisipatif bersifat Top Down dan Bottom Up. Perencanaan dengan model Top Down ini dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas & diskresi. Adapun argumentasi top-down adalah:

- Efisiensi

- Penegakan aturan (enforcement)
- Konsistensi input-target-output
- Publik/masyarakat masih sulit dilibatkan

Perencanaan dengan model Bottom Up ini dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur governance, mengandalkan persuasi, co-production. Dan argumentasi bottom-up adalah:

- Efektivitas
- Kinerja (performance, outcome), bukan sekadar hasil seketika
- Social virtue (kearifan sosial)
- Masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tatanan wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya yang cenderung sentralistik.

Teori Developmental (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama neo liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Implikasi Teori Developmental pada Perencanaan dan kebijakan : Bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi

perkotaan, penghematan skala (*economic of scale*) dan perolehan modal investasi. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan. Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency)

Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Abbot dalam (Ratnawati 2012:62) berasumsi bahwa ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (*empowerment*) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan.

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (*The Prince*, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (*Leviathan* abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro. Lebih lanjut Abbot (1996) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu

memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah.

2. Teori Sistem (The Social System)

Talcott Parsons (1991) dalam (Prasetyo 2013) berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

- a) Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- b) Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c) Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
- d) Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Apabila dimasukkan kedalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori sistem sosial ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok

agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3. Teori Mobilisasi Sumber Daya

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/ memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain. Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan rakyat. Jadi partisipasi adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan (Bryant and White, 1987:268). Dari pengertian/definisi tentang partisipasi masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa inti dari partisipasi masyarakat adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat.

Menurut Chambers (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide partisipasi memiliki dua kecenderungan, (1)

kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan (2) kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat dalam Pranata 2012:45).

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dan tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai partisipasi publik, partisipasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tahap-tahap peran serta, faktor yang mempengaruhi peran serta, sifat dan ciri peran serta, bentuk dan jenis peran serta, serta efektifitas peran serta. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen dari pelayanan prasarana dan sebagai warga masyarakat mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Partisipasi lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Partisipasi dapat dilakukan pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat (Surotinojo 2009:33).

1. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu dengan biaya semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Alasan-alasan efektifitas dan efisiensi dengan adanya partisipasi masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut (Rukmana, 1993:214):

- a. Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas;
- b. Partisipasi masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbang sumber daya mereka seperti uang dan tenaga;
- c. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu komponen yang harus diikuti sertakan dalam aktifitas pembangunan. Peran serta masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Menurut Henry Sanoff (2000) tujuan dari partisipasi/pelibatan masyarakat dalam pembangunan adalah:

- Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya akan meningkatkan kepercayaan mereka kepada organisasi

tertentu, hingga pada akhirnya akan menerima segala keputusan dan rencana serta akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab;

- Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan suara/aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tujuan supaya rencana, keputusan dan pelaksanaan yang dijalankan dapat diterima dengan baik;
- Untuk meningkatkan rasa memiliki dalam masyarakat dengan mengumpulkan orang-orang yang akan saling membagi ide/tujuan yang sama.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Derick (dalam Bryant dan White, 1987:280) mengemukakan nilai partisipasi tidak hanya terletak pada ada tidaknya partisipasi itu, hal yang terpenting adalah menentukan bentuk partisipasi yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:16) dikemukakan bahwa Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa (1) pikiran, (2) tenaga, (3) keahlian, (4) barang dan (5) uang. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu; (1) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, (2) sumbangan spontanitas berupa uang dan barang, (3) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, (4) sumbangan dalam bentuk kerja, (5) aksi massa, (6) mengadakan pembangunan di dalam keluarga dan (7) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

- a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
- b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
- c. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dussedorp (dalam Slamet, 1994:10) mengemukakan bahwa bentuk partisipasi didasarkan pada sembilan hal yaitu :

- a. Berdasarkan Derajat Kesukarelaan, terdiri dari:
 - Partisipasi Bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu.

- Partisipasi Terpaksa, disebabkan oleh hukum dan kondisi sosial ekonomi.
- b. Berdasarkan Cara Keterlibatan, terdiri dari:
- Partisipasi Langsung, terjadi bila orang itu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi.
 - Partisipasi tidak langsung, bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain/organisasi yang dapat mewakilinya di tingkat yang lebih tinggi.
- c. Berdasarkan Keterlibatan dalam Proses Pembangunan Terencana, terdiri dari:
- Partisipasi lengkap, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh tahap dari proses pembangunan yang terencana.
 - Partisipasi sebagian, bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam sebagian tahap proses pembangunan yang telah direncanakan.
- d. Berdasarkan Tingkatan Organisasi, terdiri dari:
- Partisipasi yang terorganisasi
 - Partisipasi yang tidak terorganisasi
- e. Berdasarkan Intensitas Frekuensi Kegiatan, terdiri dari:
- Partisipasi intensif, bila frekuensi aktivitas partisipasi yang dilakukan tinggi.
 - Partisipasi ekstensif, bila pertemuan yang diselenggarakan tidak secara teratur atau interval waktu kegiatan yang panjang.
- f. Berdasarkan Lingkup Liputan Kegiatan, terdiri dari:

- Partisipasi tak terbatas, bila seluruh kegiatan membutuhkan partisipasi anggota seluruh komunitas.
 - Partisipasi terbatas, bila hanya sebagian kegiatan yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipasi.
- g. Berdasarkan Efektifitas, terdiri dari:
- Partisipasi efektif, kegiatan partisipasi yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi.
 - Partisipasi tidak efektif, bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan aktivitas partisipasi yang dicanangkan terwujud.
- h. Berdasarkan Pada Pihak Yang Terlibat, terdiri dari:
- Anggota masyarakat setempat
 - Pegawai pemerintah
 - Orang-orang luar
 - Wakil-wakil dari masyarakat yang terpilih
- i. Berdasarkan Gaya Partisipasi, terdiri dari:
- Pembangunan Lokalitas
 - Perencanaan Sosial
 - Aksi Sosial.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk mengukur skala partisipasi masyarakat dapat diketahui dari kriteria penilaian tingkat partisipasi untuk setiap individu (anggota kelompok) yang diberikan oleh Chapin (dalam Slamet, 1994: 83) sebagai berikut:

- a. Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga tersebut;

- b. Frekuensi kehadiran (attendance) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan;
- c. Sumbangan/iuran yang diberikan;
- d. Keanggotaan dalam kepengurusan;
- e. Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan;
- f. Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan.

Menurut Nabeel Hamdi dan Reinhard Goethert (1997:66), sebagai bantuan untuk menguji alat dan teknik, tahapan dan program dihubungkan dalam matriks pada ketelitian tingkat partisipasi. Tingkatan partisipasi digambarkan dengan alat yang disebut Matriks, mulai dari tingkat tidak berperan serta sampai dengan tingkat pengendalian penuh oleh masyarakat digambarkan oleh sumbu tegak, sedangkan tahapan kegiatan mulai dari tahap inisiatif warga hingga tahap pemeliharaan digambarkan dengan sumbu datar.

Pelibatan atau partisipasi masyarakat menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:59), hendaknya dilakukan dalam setiap proses/tahapan pembangunan, yaitu; dalam tahap identifikasi permasalahan, proses perencanaan, pelaksanaan proyek pembangunan, evaluasi, mitigasi dan dalam tahap monitoring.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multi dimensional tentang stratifikasi

masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Kelas (ekonomi) akan membedakan kelompok masyarakat satu dengan yang lain apabila ditinjau dari tingkat pendapatan dan kekayaan. Status bergantung pada keberadaan bagaimana seseorang dilihat atau dinilai. Sedangkan kekuasaan menurut Thio dalam (Surotinojo 2009:39) adalah kemampuan seseorang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan olehnya. Stratifikasi masyarakat tersebut akan menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perilaku tolong menolong yang menjadi jiwa partisipasi.

Menurut Plumer (dalam Soetrisno, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
- b. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
- c. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

Tingkat buta huruf pada masyarakat akan mempengaruhi dalam partisipasi;

- d. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

5. Hambatan Dalam Partisipasi Masyarakat

Menurut Sunarti (2003:29), menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan. Hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya;
- b. Pola masyarakat yang heterogen. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada;

c. Sistem birokrasi. Faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. Seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang kompleks.

Menurut Loekman Sutrisno (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:56) mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu; pertama, belum ada satu kesepahaman konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi yang berlaku di lingkungan perencana dan pelaksana pembangunan, partisipasi diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Hambatan kedua adalah reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya ideologi developmentalisme di negara Indonesia. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan kendala yang akan dihadapi dengan pendekatan partisipasi ini menurut Parwoto (dalam Sunarti, 2003:44) adalah:

- a. Diperlukan perubahan sikap pemerintah dan para profesional dari penyedia (provider) menjadi enabler, hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama;
- b. Tata administrasi pada suatu pembangunan seringkali kurang mendukung pendekatan partisipatif (pelibatan masyarakat);
- c. Perlu unsur pendamping yang profesional untuk mengisi kelemahan kaum awam (masyarakat) dalam pelaksanaan suatu program pembangunan.

C. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut pasal menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan untuk berperan dalam rangka pengelolaan hidup. Menurut Sugandhy dan Hakim (2007) dalam Siregar J Teti (2010), peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan cara :

- Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan
- Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepoloporan masyarakat
- Menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
- Memberikan saran pendapat.
- Menyampaikan informasi dalam dan/atau menyampaikan laporan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pemerintah selaku regulator dalam menyusun dan menjalankan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya harus melibatkan peran serta masyarakat secara sadar atau tidak. Adanya penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat akan lebih memahami maksud dan tujuan program dan akhirnya diharapkan menumbuhkan kesadaran dan motivasi mereka untuk ikut terlibat. Upaya ini

dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, dimana pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy dalam Zubaedi, 2007:42).

1. Sanitasi Lingkungan

Pengertian sanitasi menurut WHO adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. Sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan berguna ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Entjang (2000). Sanitasi lingkungan merupakan upaya pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan atau upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya, misalnya menyediakan air bersih untuk mencuci tangan dalam memelihara dan melindungi kebersihan tangan, menyediakan tempat sampah untuk membuang sampah, membangun jamban untuk tempat membuang kotoran dan menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Akses penduduk kepada prasarana dan sarana air limbah permukiman dan persampahan pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek kesehatan, lingkungan

hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase (serta pemahaman tentang *hygiene*) semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (*waterborne diseases*). Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya-upaya terobosan yang bersifat merubah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan. Beberapa upaya bisa dilakukan terhadap pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah lebih berperan sebagai *regulator* dan *fasilitator* terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan.

2. Konsep Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Sanitasi oleh Masyarakat merupakan sebuah inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah pemukiman yang berbasis masyarakat dengan pendekatan tanggap kebutuhan. Fokus kegiatan adalah penanganan air limbah rumah tangga khususnya tinja manusia, namun tidak tertutup juga untuk menangani limbah cair industri rumah tangga yang dapat terurai secara alamiah seperti industri tahu, tempe dan sejenisnya. Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat (terdiri dari 2 kegiatan) yaitu:

- a) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah Komunal
- b) Pengembangan Fasilitas Pengurangan Sampah dengan Pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Program ini berusaha untuk berperan dalam menyediakan sarana sanitasi dalam penanganan air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan padat penduduk, kumuh, dan rawan sanitasi dengan pendekatan yang tanggap kebutuhan (berbasis masyarakat) yang berkelanjutan dan salah satu program pembangunan prasarana air limbah yang menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat melalui:

- a) Keberpihakan pada warga yang berpenghasilan rendah, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada penduduk miskin yang bermukim di permukiman padat perkotaan berdasarkan kebutuhan;
- b) Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan hasilnya;
- c) Mendorong prakarsa lokal dengan iklim keterbukaan, dimana masyarakat menyampaikan permasalahan dan merumuskan kebutuhannya secara demokratis dan transparan;
- d) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan;

e) Keswadayaan, dimana kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat bertujuan mengembangkan sanitasi lingkungan skala komunitas berbasis masyarakat dengan pemilihan lokasi yang menjamin kontinuitas pelayanan kepada masyarakat baik operasional maupun perawatannya. Pemilihan Lokasi yang tepat adalah kunci keberhasilan program ini. Secara umum diluar ketentuan administratif dan teknis, lokasi terbaik adalah :

- a) Kepadatan penduduk di atas 150 jiwa/ha (pemakai tetap)
- b) Dekat jalur transportasi masyarakat lainnya dan atau prasarana publik lainnya (pemakai tak tetap).
- c) Terjamin ketersediaan air bersih

3. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sanitasi Lingkungan

Dalam pengelolaan prasarana sanitasi lingkungan agar dapat berkelanjutan sangat diperlukan kemitraan antara beragam stakeholder. Peran stakeholder terlihat dari aktivitasnya dalam pengelolaan prasarana tersebut. Dengan adanya pendekatannya, keterkaitan antara peran atau intervensi pemerintah, khususnya pemerintah lokal dapat diwujudkan lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas semata melalui pendekatan terpadu yang melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat). Hal ini menguatkan konsep keberlanjutan yang tidak bisa

melepaskan pendekatan partisipasi masyarakat didalamnya dengan bantuan pemerintah dan pihak ketiga (fasilitator).

Teori Perencanaan Kontijensi berasumsi bahwa Stakeholders perlu untuk secara terus-menerus diberi informasi tentang visi, hasil rencana yg diharapkan, dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, agar setiap langkah yang diambil selalu mendapatkan dukungan dari mereka.

Ada sepuluh prinsip-prinsip pengelolaan prasarana yang berkelanjutan yang diutarakan oleh Choguill (1996) dalam Siregar J Teti (2010), yaitu sebagai berikut :

- a) Harus disadari bahwa dalam pengelolaan prasarana terdapat dua sektor, yakni formal dan non formal.
- b) Bahwa dalam pengelolaan prasarana memerlukan teknologi yang mampu dioperasionalkan oleh pengelolanya sendiri (masyarakat) dan menggunakan prinsip *cost recovery*.
- c) Status tanah menjadi masalah yang harus bisa diselesaikan dengan supaya tidak memberikan dampak yang merugikan terhadap sistem perkotaan.
- d) Prasarana informal harus didesain dan dibangun dengan bantuan teknis dari luar sehingga dapat disatukan dalam sistem perkotaan, yang harus disadari memerlukan waktu yang lama.
- e) Pengelolaan prasarana dan sarana harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan, operasional serta pemeliharaan. Keterlibatan pemerintah dan pihak ketiga

(fasilitator) hanya sebagai ‘*supporter*’ bukan lagi sebagai pemilik dan ‘*manager*’ dari suatu kegiatan pembangunan.

- f) Teknologi yang dipilih harus mampu dioperasikan dan dipelihara sendiri oleh masyarakat.
- g) Prasarana harus mampu melayani pengguna dengan tingkat pendapatan yang rendah (miskin).
- h) Prasarana yang dibangun harus diterima secara sosial oleh masyarakat lokal/setempat.
- i) Peningkatan peran pemerintah sebagai ‘*enabler*’ dan ‘*fasilitator*’ dalam pembangunan prasarana diperlukan untuk mencapai cakupan layanan prasarana yang lebih luas.
- j) Organisasi non pemerintah (LSM) dapat lebih berperan/terlibat dalam membantu pemberdayaan masyarakat sehingga implementasi pembangunan berbasis partisipasi lebih diterima sebagai pendekatan pembangunan terkini.

Peran pemerintah sebagai ‘*enabler*’ dan ‘*fasilitator*’ diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kemauan masyarakat dalam mengelola prasarana melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui kelembagaan, sarana dan prasarana serta pengembangan 3-P (pendampingan, penyuluhan dan pelayanan) Vitalya dalam (Zubaedi, 2007:103). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan maupun pembinaan tentang teknik-teknik pengelolaan prasarana sanitasi lingkungan permukiman.

Social Mobilization (Mobilisasi Sosial) adalah gerakan yg berskala luas yg melibatkan partisipasi masyarakat melalui upaya *self-reliance* (memberikan rasa percaya diri) .*Social Mobility*, juga dapat dilihat sebagai sebuah teori perencanaan yg berasumsi bahwa untuk mencapai suatu tujuan dari pembangunan tertentu, dibutuhkan gerakan yg melibatkan semua segmen yg ada dalam masyarakat: Yakni: para pengambil kebijakan, para pemimpin opini, para birokrat, kelompok-kelompok profesional, asosiasi-asosiasi keagamaan, komersil & industri, komunitas-konimtas dan para individu. Bahwa untuk itu dibutuhkan sebuah proses sentralisasi yg terencana yg bertujuan memfasilitasi perubahan untuk pembangunan, melalui berbagai “pemain” yg terlibat dan saling terkait serta saling melengkapi.

Menurut Adisasmita (2006:39) tahapan-tahapan dari kegiatan yang harus dilakukan pemerintah agar pemberdayaan masyarakat tadi dapat lebih partisipatif, dimulai dari sosialisasi, pendampingan, penguatan kelembagaan, dan implementasi kegiatan. Sosialisasi merupakan tahap awal proses pemberdayaan, adanya pemahaman tentang suatu informasi kebijakan pemerintah menumbuhkan kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk bermitra dengan pemerintah. Tahap pendampingan melalui pelatihan dan pembinaan baik teknis maupun administrasi diharapkan dapat menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahap selanjutnya adalah tahap penguatan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana untuk implementasi kegiatannya. Munculnya kelembagaan masyarakat yang operasional akan dapat bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan

lingkungan hidup itu sendiri. Penguatan melalui penyediaan alokasi dana pembangunan sarana dan prasarana berfungsi sebagai pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non-fisik di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri akan melibatkan peran organisasi non pemerintah (LSM) dalam hal ini konsultan pendamping sebagai pelaku perubahan (*agent of change*), yang umumnya lebih memiliki kemampuan manajerial dan teknik yang lebih baik sehingga mampu menjembatani dialog antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. konsultan pendamping ini juga sebagai pemberdayaan, dimana konsultan dengan mengedepankan kesabaran akan mengajak warga berubah melalui proses sosialisasi dan pembelajaran secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah yang ada. Selanjutnya peranan seorang konsultan pendamping dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai pendampingan.

Menurut Zubaedi (2007:85) fungsi pendampingan sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok lembaga masyarakat sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), dan motivator. Tanggung jawab konsultan dalam mendampingi masyarakat, yaitu :

- a) Peran pendamping sebagai motivator, dalam peran ini, pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
- b) Peran pendamping sebagai komunikator, dalam peran ini pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada

masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.

c) Peran pendamping sebagai fasilitator, dalam peran ini pendamping berusaha memberi pengarahannya tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, pendekatan dalam pelaksanaan program.

Dalam pengelolaan prasarana lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah semata, dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya sesuai dengan 10 prinsip dalam pengelolaan prasarana yang berkelanjutan. Keberlanjutan pengelolaan ini merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai individu, budaya organisasi dan masyarakat, proyek-proyek dan program-program praktis di masyarakat. Pada intinya, keberlanjutan pengelolaan prasarana sanitasi lingkungan karena adanya hubungan baik antara kelompok masyarakat kualitas masyarakat dan kapasitas mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan terletak dalam hubungan baik (*relationship*). Hubungan-hubungan penting ini tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan hasil dari interaksi dari semua stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memanfaatkan lingkungan secara adil, akan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi generasi yang akan datang.

4. Kepedulian Masyarakat Merujuk pada Sikap dan Perilaku

Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial) adalah teori perencanaan yang berkeyakinan bahwa untuk merubah orang-orang menuju pada suatu akhir yang diinginkan, orang-orang tersebut harus diberi motivasi melalui pembelajaran sehingga ia masuk kedalam perilaku yang diinginkan tersebut.

Menurut Riwayadi dan Anisyah (2000:275) kepedulian adalah keadaan perasaan, pikiran, dan tindakan yang menghiraukan sekitarnya sedangkan masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk peri kehidupan berbudaya. Kepedulian masyarakat dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan sekelompok orang yang berbudaya yang saling menghiraukan atau mengindahkan sekitarnya. Kepedulian merujuk kepada sikap dan perilaku menempatkan diri sendiri dalam konteks kepentingan yang lebih luas, berusaha untuk memperhatikan kepentingan pihak lain berdasarkan rasa memiliki dan tanggung jawab (Wirutomo, 2004:131). Kata kunci kepedulian terletak pada kata sikap dan perilaku di mana antara sikap dan perilaku saling berhubungan satu sama lain.

Teori Herzberg (Teori dua faktor), teori ini dikenal dengan teori dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor *hygiene* atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor *hygiene* atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.

Menurut Staats dalam Artiningsih, perilaku ramah lingkungan diukur dengan beberapa variabel yang mana keseluruhan variabel tersebut merupakan perilaku masyarakat sehari-hari dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jawaban-jawaban seseorang tentang sejauh mana berperilaku ramah lingkungan yaitu seberapa baik hubungannya dengan masyarakat, pemerintah lokal juga pihak swasta (*relationships*), motivasi dan kemauan personalnya (*personality*), alasan praktis terkait dengan ketersediaan waktu, taraf hidup, dan ukuran rumah tangganya (*practicality*), kesadarannya sebagai masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan (*responsibility*) dan norma budaya (*culture*) (Davies dkk dalam Artiningsih, 2009:17).

Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya sehingga apabila kita ingin merubah perilaku seseorang kita juga harus merubah sisi sosial dan budaya orang tersebut, juga dapat melalui dorongan adanya kebijakan tentang perubahan perilaku. Permasalahan yang sering timbul dalam merubah perilaku seseorang adalah tingkat pengetahuan yang berbeda-beda dari masing-masing individu sehingga dalam memahaminya akan mengalami kesulitan. Dengan demikian penyusunan kebijakan tidak sebatas menyusun visi dan misi saja, tetapi lebih dari itu perlu suatu proses penterjemahan ke dalam strategi yang lebih konkret melalui sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat pada level lokal (Artiningsih, 2008). Kepedulian seseorang terhadap lingkungannya tercermin dari perilakunya yang dapat diamati sehari-hari. Perilaku ramah lingkungan dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan. Di mana cara

pembentukan perilaku sesuai dengan yang diharapkan ditentukan oleh tiga hal, yaitu (Walgito, 2004:13) :

a) Pembentukan perilaku dengan kebiasaan (*conditioning*)

Dengan cara membiasakan diri, sehingga perilaku berwawasan lingkungan yang dilakukan sehari-hari dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat tersebut, seperti membuang sampah pada tempatnya, memelihara tanaman, dan lain - lain.

b) Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*)

Dengan cara belajar dari pengetahuan tentang berwawasan lingkungan sehingga dapat dipahami dan bagaimana seharusnya memperlakukan lingkungan tersebut, seperti membaca dan mempelajari tentang dampak *global warming*.

Dari uraian di atas dapat disintesis bahwa perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal (seperti: tingkat pendidikan, mata pencaharian, jenis kelamin, usia, dan lain-lain) dan faktor eksternal (seperti: lingkungan, ekonomi) akan memotivasi manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Melalui tiga cara pembentukan perilaku yaitu; melalui kebiasaan (*conditioning*), melalui pengertian (*insight*), dan melalui pencontohan (*voluntary*). Perilaku yang terbentuk menjadi lebih berwawasan lingkungan akan mencerminkan kepedulian masyarakat tersebut.

D. Kajian Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, mahasiswa Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dengan judul tesis “Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (2006)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di Kabupaten Tebo. Dalam penelitiannya Gunawan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu pemaknaan informasi yang didapatkan dari hasil pengolahan data menggunakan program SPSS Release 12 For Windows. Crosstabs hanya digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan pemaknaan dua variabel yang ditabulasikan dalam satu tabel untuk menggali makna tertentu, tanpa melihat seberapa signifikan kedua variabel tersebut berhubungan secara statistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pembangunan berbasis masyarakat menitikberatkan posisi masyarakat sebagai mitra juga belum terwujud. Sedangkan konsep sanimas sendiri yang menitikberatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan sanimas belum terwujud. Sedangkan rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah keterbatasan penyediaan sanitasi oleh pemerintah atau peran masyarakat dalam SANIMAS (berpedoman pada konsep manajemen pembangunan prasarana perkotaan yang menitikberatkan peran yang seimbang antar pelaku pembangunan) dan membangun budaya berpikir responsif, bukan reaktif dalam kaitan hubungan sebab-akibat terjadinya pencemaran lingkungan (belajar pada dampak negatif tentang warisan budaya masyarakat di wilayah studi terkait sanitasi).

Penelitian yang dilakukan oleh Juliany Siregar, mahasiswa Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dengan judul tesis “Kepedulian Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai(2010)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana kepedulian masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai. Dalam penelitiannya Juliany Siregar menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 2 tahap. Tahap pertama : analisis untuk mengetahui karakteristik praktek perilaku masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Matahalasan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan memperhatikan data hasil wawancara dan pengamatan tentang peran dan aktivitas masyarakat sebelum dan sesudah perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Matahalasan. Tahap kedua : analisis faktor-faktor penentu kepedulian masyarakat terhadap perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh yang dilihat dari karakteristik praktek perilaku masyarakat sebelum dan sesudah perbaikan sanitasi lingkungan dan hasil wawancara dengan informan tentang hal-hal yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses perbaikan sanitasi lingkungan di Kelurahan Matahalasan terjadi akibat adanya perubahan perilaku yang selama ini dalam prakteknya kurang ramah pada lingkungan. Perubahan perilaku ini tidak terjadi dengan sendirinya dan dorongan pemerintah sebagai wujud hubungan baik (relationship) antar masyarakat dan pemerintah serta swasta. Keterlibatan

masyarakat mulai dari proses inisiasi awal, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan serta pengawasan penggunaan MCK++ dimotivasi oleh adanya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sanitasi lingkungan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah perencanaan, melalui sosialisasi dan rebug warga yang juga melibatkan beragam stakeholder akan tersusun suatu perencanaan terpadu yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pelaku pembangunan nantinya dengan tujuan yang praktis dan *aplicable*. Melalui perencanaan terpadu, konsep pembangunannya jelas, pemilihan teknologinya sesuai dengan kemampuan penggunaannya, kepastian tugas dan tanggung jawab dari stakeholder yang terlibat dan dilibatkannya masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat, kemandirian dan kemampuan mereka akan dapat melaksanakan pembangunan tidak hanya dibiayai oleh pemerintah atau swasta, tetapi akan muncul kesadaran mereka untuk menyisihkan pendapatan mereka melalui iuran bersama untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Surotinojo, mahasiswa Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dengan judul tesis “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (Sanimas) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo (2009)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program SANIMAS di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Dalam penelitiannya Gunawan menggunakan analisis teknik

analisis deskriptif kuantitatif seperti dengan distribusi frekuensi, skala interval dan multifariat tabulasi silang (crosstab) ditunjang dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Partisipasi dalam bentuk tenaga diberikan masyarakat pada seluruh tahapan program pembangunan, sedangkan partisipasi dalam bentuk pikiran/ide dan material lebih dominan diberikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi dalam bentuk uang diberikan lebih banyak dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan/pemeliharaan. Dalam tahap program inisiatif dan pembuatan rancangan, partisipasi masyarakat berada pada tingkatan tidak langsung (indirect), dalam tahap program penyusunan rencana, berada pada tingkatan pengendalian terbagi (shared control). Dalam tahap program pelaksanaan dan pemeliharaan, partisipasi masyarakat pada tingkatan pengendalian penuh (full control). Sedangkan rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan, khususnya terhadap prasarana sanitasi diharapkan dapat terus berjalan dan berkelanjutan juga, tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan, namun diharapkan sampai dengan tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun dan model pendekatan pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip dan pola penyelenggaraan yang dilaksanakan dalam program SANIMAS di Desa Bajo dapat diadopsi, direplikasi dan dikembangkan di lokasi lain dan pembangunan prasarana perkotaan lainnya.

E. Kerangka Pemikiran Studi

Kota Belopa menjadi salah satu konsentrasi terbesar, sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu (2012), mempunyai masalah sanitasi buruk dengan kondisi sangat memprihatinkan. Artinya sistem sanitasinya yang cenderung mencemari lingkungan. Adanya kontradiktif antara faktor-faktor internal (karakteristik) masyarakat penerima program sanitasi lingkungan dengan keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program itu sendiri. Program sanitasi lingkungan itu sendiri terkait secara integral dengan kondisi penduduk dan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Luwu. Kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun memperburuk kondisi yang sudah ada. Proses perencanaan sampai dengan pembangunan prasarana sanitasi yang dilakukan kurang mengakomodir keinginan dan urgensi kebutuhan masyarakat. *Teori Developmental* (bercorak pembangunan) menekankan bahwa rencana-rencana pembangunan harus diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (*economic of scale*) dan perolehan modal investasi. Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada peningkatan prasarana yang dapat mengatasi masalah ketimpangan. Perencanaan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

Guna mewujudkan pembangunan prasarana yang efisien dan efektif, maka mulai dari perumusan rencana harus melalui kesepakatan antara pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan masyarakat sebagai pengguna. Untuk penyelesaian masalah sanitasi kota, maka pendekatan yang perlu digunakan adalah pendekatan partisipasi masyarakat. Abbot (1996) menyatakan bahwa

pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Abbot dalam (Ratnawati 2012:62) berasumsi bahwa ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan. Sedangkan Talcott Parsons (1991) dalam (Prasetyo 2013) berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide partisipasi memiliki dua kecenderungan, (1) kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. dan (2) kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat dalam Pranata 2012:45).

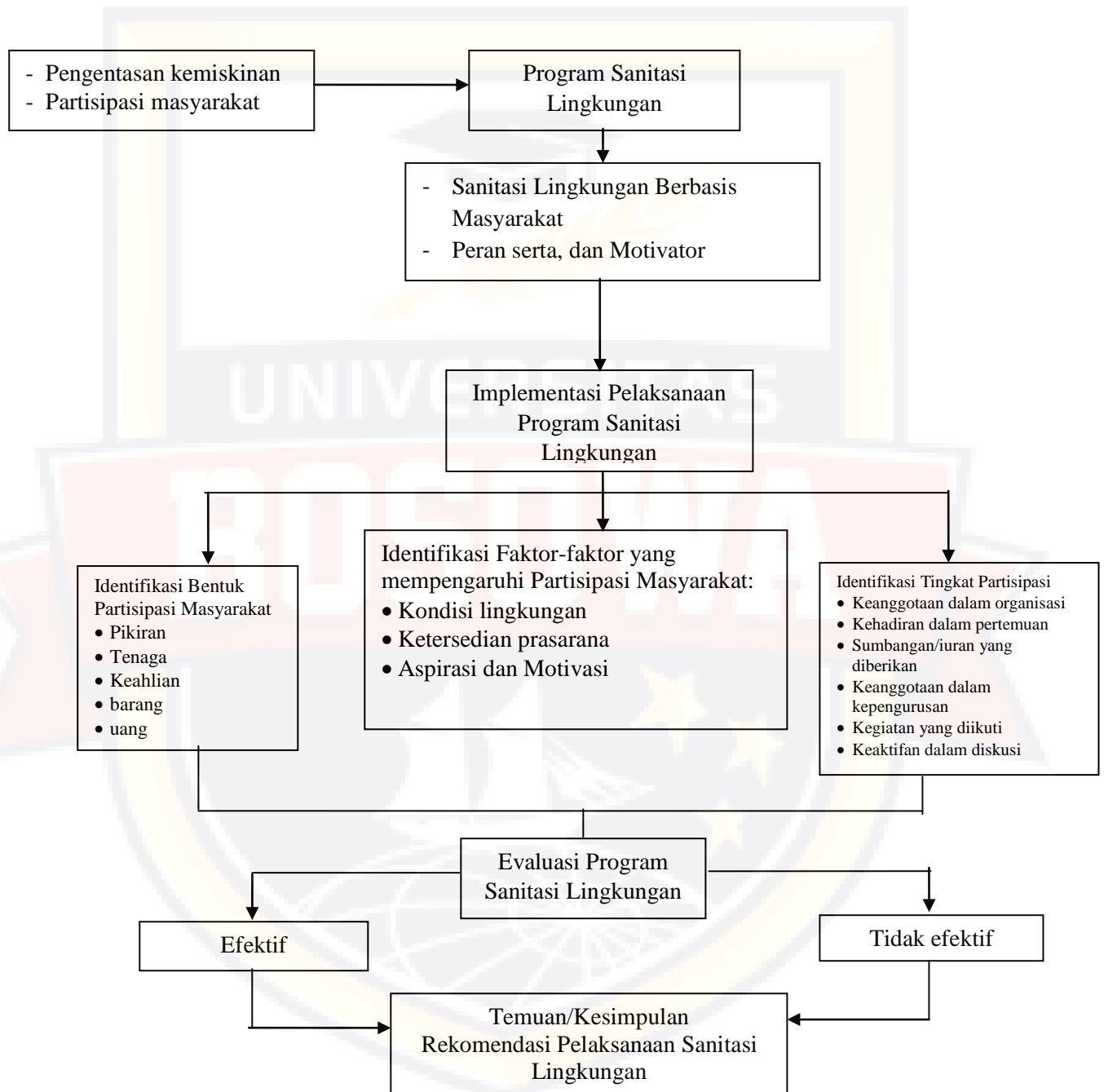
Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:16) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa (1) pikiran, (2) tenaga,

(3) keahlian, (4) barang dan (5) uang. Tingkat partisipasi masyarakat menurut Chapin (dalam Slamet, 1994: 83) dapat diukur melalui : (1) Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga, (2) Frekuensi kehadiran (attendance) dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, (3) Sumbangan/iuran yang diberikan, (4) Keanggotaan dalam kepengurusan; (5) Kegiatan yang diikuti dalam tahap program yang direncanakan, dan (6) Keaktifan dalam diskusi pada setiap pertemuan yang diadakan. Sedangkan menurut Plumer (dalam Soetrisno, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: (1) Pengetahuan dan keahlian, (2) Pekerjaan masyarakat, (3) Tingkat pendidikan, (4) Jenis kelamin, (5) Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Rusmanto, (2013) menyimpulkan bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari pertanyaan tersebut mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi.

Keluaran studi berupa kesimpulan dan rekomendasi merupakan kristalisasi dari temuan-temuan yang dihasilkan pada tahap analisis. Kristalisasi merupakan pemaknaan terkait efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan ditinjau dari partisipasi masyarakat Kota Belopa. Berlandaskan teori-teori terkait dengan tujuan peneliti diketahui beberapa faktor (variabel) terkait dengan efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa dan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

Untuk lebih jelasnya alur pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

F. Proposisi Penilaian

Proposisi merupakan asumsi-asumsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan kajian teori. Proposisi di maksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi kegiatan penelitian. Dari kerangka pikir yang diungkapkan terutama efektivitas dan pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

Dalam pengelolaan limbah cair domestik sebagian besar masyarakat di Kota Belopa masih menggunakan sistem *on site* (setempat) serta masih sangat sedikit yang sudah menggunakan sistem komunal untuk pengelolaan *black water*. Di sisi lain masyarakat Kota Belopa masih terdapat angka buta huruf, tingkat pendidikan relatif masih minim, kondisi perekonomian yang masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta aksesibilitas yang relatif masih sulit, tentu saja mempengaruhi pola pikir dan perilaku hidup yang masih sangat bergantung pada kebijakan, serta belum begitu mengedepankan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Atas dasar itu sosialisasi penyadaran masyarakat penting, baik melalui jalur formal maupun informal. Pemerintah Kota Belopa sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi ini melalui program-program perbaikan lingkungan permukiman dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Namun pada kenyataannya tidak semua program dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan tidak semua masyarakat memiliki kepedulian

terhadap lingkungannya. Dari ungkapan tersebut, diturunkan beberap proposisi sebagai berikut:

1. Implementasi pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa belum berjalan optimal karena belum melibatkan masyarakat secara penuh (top down) akibatnya masyarakat merasa tidak turut memiliki prasarana sanitasi yang telah dibangun karena merasa tidak punya andil didalamnya.
2. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa masih cukup rendah dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun, hal ini ditandai dengan bentuk, tingkat, dan adanya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2006) pendekatan ini termasuk jenis penelitian non eksperimental, karena data yang diteliti sudah ada, bukan sengaja ditimbulkan. Sedangkan metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena data yang diperoleh banyak berupa angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta menampilkan hasilnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kota Belopa Kabupaten Luwu. Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena salah satu daerah konsentrasi terbesar yang rawan sanitasi di Kabupaten Luwu dan merupakan lokasi pembangunan program sanitasi lingkungan tahun 2013. Hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji fenomena tersebut.

Adapun waktu penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2016 .

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono: 80:2013). Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi, yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini populasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah keluarga yang merupakan pengguna atau pemanfaat prasarana sanitasi lingkungan dan pemerintah/stakeholder terkait dengan pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

Dalam penentuan sample yang akan diambil dalam penelitian ini digunakan dua metode sebagai berikut :

1. Sampel Masyarakat

Menggunakan sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Metode ini digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikianrupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel (Sugiarto et.al, 2001:46). Pemilihan sampel dari populasi ini dipilih satu persatu secara random. Populasi yang akan menjadi obyek penelitian berjumlah 217 Kk yang merupakan pengguna atau pemanfaat prasarana sanitasi lingkungan di Kota Belopa, sehingga dalam penelitian ini sampel masyarakat sebanyak 68 KK dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut

sudah melebihi jumlah sampel minimal dalam penelitian ($n = 30$) Riduan (2004:276). Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = N \frac{1}{1 + (N(d^2))}$$

$$n = \frac{217}{1 + 2,17}$$

$$n = 68$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

d = Derajat Kecermatan,

dipilih 10%

2. Sampel Pemerintah

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah/stakeholder terkait langsung dengan program pembangunan sanitasi lingkungan di Kota Belopa. Asumsi dalam penelitian ini bahwa jumlah populasi tidak terbatas sehingga pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode Nonprobability Sampling (Metode Tak Acak), untuk kemudahan mendapatkan sample digunakan metode Convenience Sampling atau sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. Menurut Sugiarto, dkk (2003) pengambilan sample dengan cara ini, berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, dengan kata lain sample diambil atau terpilih karena sample tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat saat penelitian.

Sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 32 sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut sudah melebihi jumlah sampel minimal dalam penelitian ($n = 30$). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Jumlah populasi dan sampel

No	Sampel	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Masyarakat	217	68
2.	Instansi Pemerintah	-	32
Total jumlah sampel yang dibutuhkan			100

Sumber : Analisis Pengolahan Data 2 016

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari individual atau kelompok berupa pengisian dari kuesioner hasil wawancara dan observasi. Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui instansi yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu data skunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dari penjelasan diatas kebutuhan data dalam penelitian sesuai dengan jenis dan sumber data dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kebutuhan Data Penelitian

No	Faktor/Variabel	Indikator / Sub variabel	Sumber Data	Cara Pengumpulan Data
1	Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat • Karakteristik dan Perilaku masyarakat 	Data Primer	Survey dengan menggunakan instrumen kuesioner (a s/d e)
2	Bentuk partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga • Pikiran • Keahlian • Barang/material 	Data Primer	Survey dengan menggunakan instrumen kuesioner

No	Faktor/Variabel	Indikator / Sub variabel	Sumber Data	Cara Pengumpulan Data
				(a s/d e)
3	Tingkat partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dalam pertemuan • Keterlibatandalam kegiatanfisik • Keaktifan dalam diskusi • Keanggotaan dalam organisasi 	Data Primer	Survey dengan menggunakan instrumen kuesioner (a s/d e)
6	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lingkungan • Ketersediaan prasarana • Aspirasi dan Motivasi 	Data Primer	Survey dengan menggunakan instrumen kuesioner (a s/d e)
7	Data kondisi eksisting wilayah studi	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi fisik wilayah • Keadaan sosial ekonomi masyarakat • Kondisi sarana dan prasarana 	Data Primer Data Sekunder	Observasi dan dokumentasi
8	Data Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk perkelurahan • Jumlah penduduk menurut mata pencaharian • Jumlah penduduk menurut jenis kegiatan 	Data Sekunder	Dokumentasi
9	Kebijakan Pemerintah Daerah	Peraturan daerah tentang sanitasi lingkungan	Data Sekunder	Dokumentasi

Sumber :Hasil Pengolahan Data 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditujukan mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan masukan untuk setiap tahap analisis berikutnya. Dalam pengumpulan data terdapat 2 (dua) cara pengumpulan data yaitu:

1. Pengumpulan Data Primer

- a. Survey, teknik ini dilakukan dengan kuesionerya itu membuat sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden melalui masyarakat dan aparat pemerintah/stakeholder yang terkait langsung dengan program sanitasi lingkungan.
- b. Observasi, teknik ini menggunakan checklist data berupa pengamatan kondisi fisik, gambaran terkait kondisi prasarana dan sarana sanitasi di wilayah studi.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung dari sumber/obyek. Data-data diperoleh dari tulisan seperti buku buku teori, buku laporan, peraturan-peraturan, dan dokumen baik yang berasal dari instansi terkait maupun hasil kajian literatur. Data sekunder berupa data fisik ekonomi dan social wilayah studi, data kependudukan serta kebijakan pemerintah daerah terkait dengan program sanitasi lingkungan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif seperti dengan distribusi frekuensi, skala interval dan

multifariat tabulasi silang (*crosstab*). Penjelasan dari teknik analisis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif -Kuantitatif

Data yang terjaring melalui hasil observasi di lokasi penelitian, diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Crosstabulation*). Data yang terkumpul dilakukan kategorisasi dengan skala likert, yaitu sangat berpengaruh, berpengaruh, kurang berpengaruh, tidak berpengaruh dan sangat tidak berpengaruh. Penentuan kategorisasi didasarkan pada :

No	Skala Likert	Persentase (%)	Nilai Bobot
1	Sangat Berpengaruh	88,87 – 100	5
2	Berpengaruh	66,67 – 88,88	4
3	Kurang Berpengaruh	44,45 – 66,66	3
4.	Tidak Berpengaruh	22,23-44,44	2
5.	Sangat Tidak Berpengaruh	0,00-22,22	1

Untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana Pengaruh Perubahan Pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif data pada penelitian ini dengan cara; menghitung nilai rata-rata berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian yang telah dikuantitatifkan. Hasil yang telah diperoleh pada tahap I didistribusikan ke dalam tabel silang (*crosstab*) yang menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan arah dan tujuan pengembangan analisis.

2. Analisis Uji Korelasi

Analisis ini merupakan salah satu cara untuk mengkaji keterkaitan antara faktor yang berpengaruh antara koefisien korelasi (r). Dimana analisis ini digunakan untuk menentukan korelasi antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas dengan rumus berikut ini :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana pedoman interpretasi koefisien korelasi antar variabel yang diuji mengacu pada pedoman sebagai berikut:

Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Yang Berpengaruh

No.	Tingkat Hubungan	Interval Koefisien
1	Sangat Kuat	0,800 – 1,000
2	Kuat	0,600 – 0,799
3	Sedang	0,400 – 0,599
4.	Rendah	0,200 -0,399
5.	Sangat Rendah	0,00 – 0,199

Sumber : Soegiyono 2005, 214

Keterangan :

r = Rata-rata korelasi

n = Jumlah Variabel

Y = Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan

Σ = Total Jumlah

Dengan Variabel yang digunakan yaitu :

X = Variabel bebas (perubahan social ekonomi masyarakat) dengan variabel yang digunakan yaitu :

X_1 = Bentuk partisipasi masyarakat

X_2 = Tingkat partisipasi masyarakat

X_3 = Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Dengan asumsi :

r = mendekati harga 0, hubungan antara kedua perubah sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali

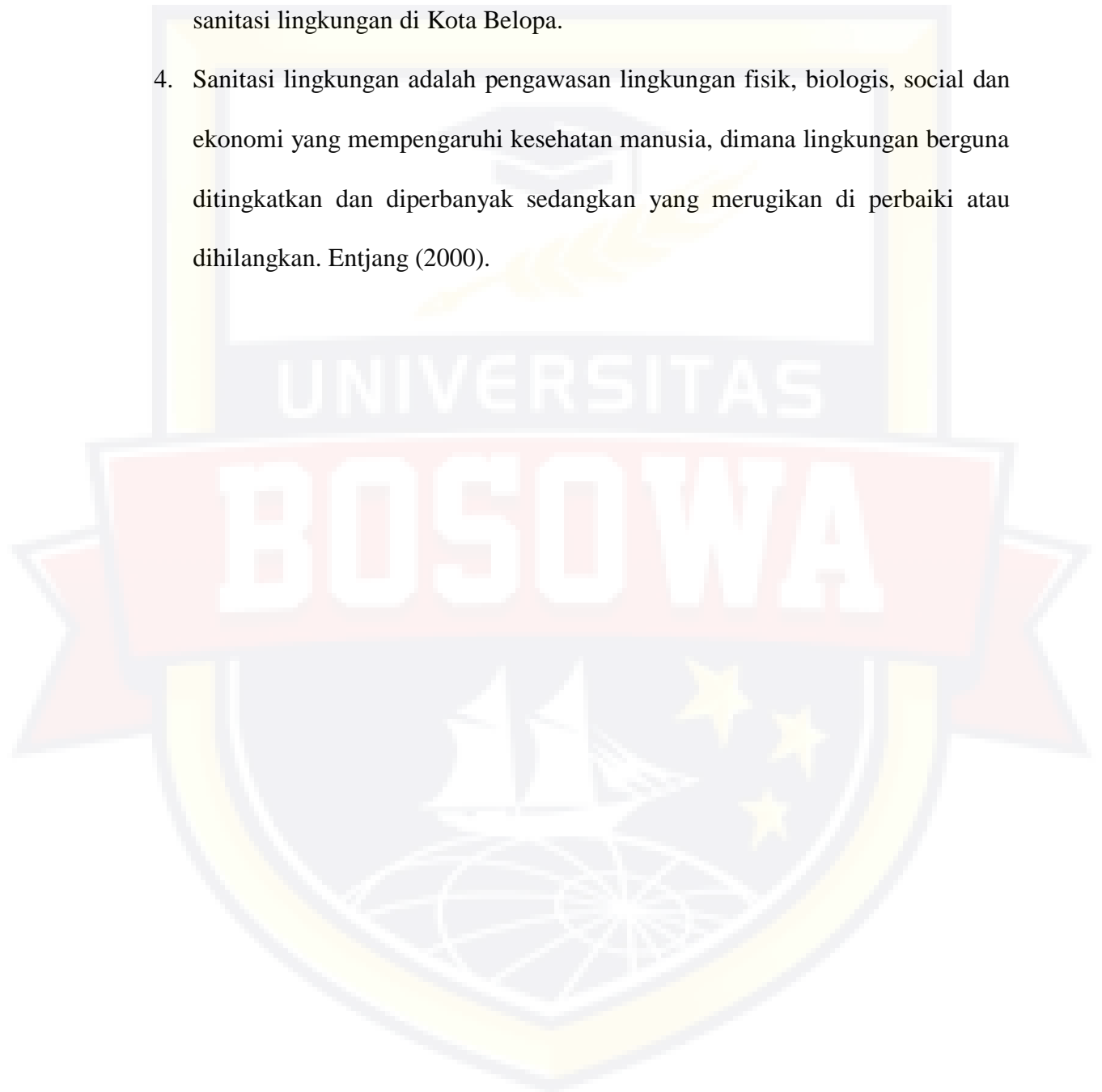
r = 1 atau mendekati 1, korelasi antara kedua perubah dikatakan positif dan sangat kuat.

r = -1 atau mendekati -1, korelasi antara kedua perubah sangat kuat dan negatif. (Sugiyono, 2005,215).

G. Defenisi Operasional

1. Partisipasi masyarakat dalam penelitian dikaji dengan keterlibatan masyarakat dan ikut serta bertanggungjawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok masyarakat dalam pelaksanaan sanitasi, sehingga masalah sanitasi lingkungan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah kota yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.
2. Efektivitas dalam penelitian ini dikaji dengan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah dalam pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa.

3. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini masyarakat pengguna sanitasi lingkungan di Kota Belopa.
4. Sanitasi lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, social dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, dimana lingkungan berguna ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan yang merugikan di perbaiki atau dihilangkan. Entjang (2000).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu berada pada posisi berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari Kota Makassar. Secara geografis berada pada posisi 2° 34,45' - 3° 30,30'' Lintang Selatan sampai dan 120° 21,15' - 121° 43,11'' Bujur Timur. Secara administrasi batas Kabupaten Luwu terdiri dari:

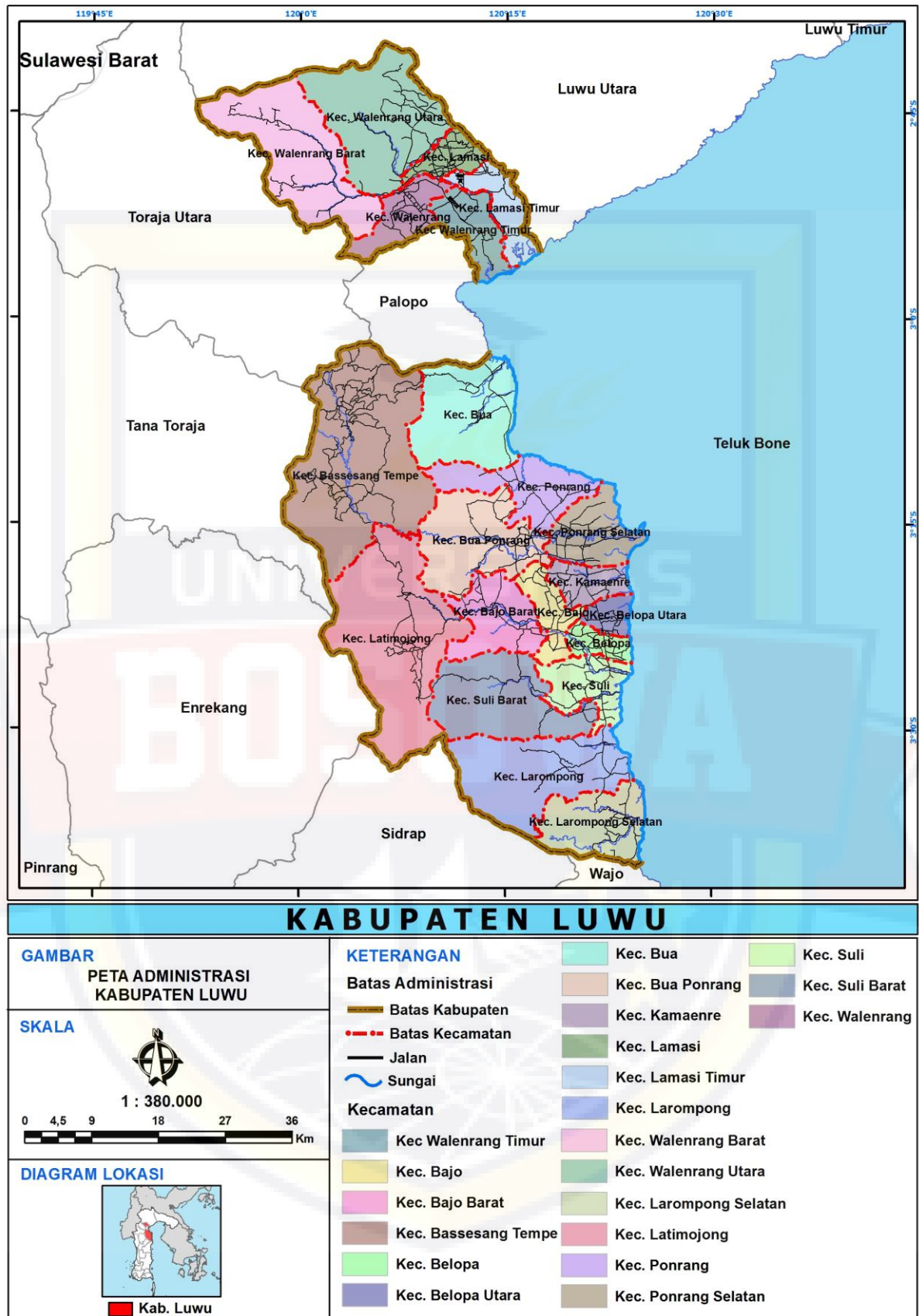
- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Teluk Bone

Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah kurang lebih 3.000,25 km² terdiri dari 22 kecamatan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen. Luas wilayah serta persentase terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Luwu Dirinci Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase (%)
1	Larompong	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	131,00	4,37
3	Suli	81,75	2,72
4	Suli Barat	153,50	5,12
5	Belopa	59,26	1,98
6	Kamanre	52,44	1,75
7	Belopa Utara	34,73	1,16
8	Bajo	68,52	2,28
9	Bajo Barat	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	178,12	5,94
11	Latimojong	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	122,88	4,10
13	Bupon	182,67	6,09
14	Ponrang	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	99,98	3,33
16	Bua	204,01	6,80
17	Walenrang	94,60	3,15
18	Walenrang Timur	63,65	2,12
19	Lamasi	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	57,65	1,92
Jumlah		3.000,25	100,00

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2016



Gambar 4.1

Peta Administrasi Kabupaten Luwu

B. Gambaran Umum Kota Belopa

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa membentang seluas 93,99 Km², dan terletak pada jalur yang menghubungkan Kota Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan Kota Palopo. Dalam konstelasi regional, Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa merupakan simpul Kabupaten Luwu yang berkedudukan sebagai ibu kota kabupaten. Secara administratif kewilayahan, pembentuk Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa ini terdiri 2 (dua) wilayah administrasi kecamatan. Namun dari kedua kecamatan tersebut tidak secara keseluruhan termasuk dalam Bagian Wilayah Perkotaan Belopa. Wilayah administrasi kecamatan tersebut, meliputi Kecamatan Belopa, dan Kecamatan Belopa Utara, dengan batas fisik, meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kamanre;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suli; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajo.



Gambar 4.2
Peta Administrasi Kota Belopa

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa ke dalam wilayah kelurahan/desa sebagai wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Belopa

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Kec. Belopa	59,26	100,00
	- Balubu	17,61	29.72
	- Pasamai	3,12	5.26
	- Senga Selatan	8,00	13.50
	- Senga	6,11	10.31
	- Belopa	4,54	7.66
	- Balo-Balo	5,38	9.08
	- Kurrusumanga	7,20	12.15
	- Tanamanai	3,30	5.57
	- Tampumia Radda	4,00	6.75
2	Kec. Belopa Utara	34,73	100,00
	- Lebani	5,17	14.89
	- Pammanu	6,17	17.77
	- Lamunre	3,17	9.13
	- Lauwa	2,1	6.05
	- Paconne	2,14	6.16
	- Seppong	10,13	29.17
	- Sabe	3,52	10.14
	- Lamunre Tengah	2,33	6.71
	TOTAL	93,99	-

Sumber: RDTR Kota Belopa Tahun 2014

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kondisi topografi Kawasan Perkotaan Belopa beragam mulai dari datar sampai bergelombang ringan dengan ketinggian tempat 0 - 240 Mdpl (meter diatas permukaan laut) yang diukur dari ibukota kecamatan. Kawasan Perkotaan Belopa berada pada wilayah pesisir dan wilayah daratan. Ketinggian 0 - 60 Mdpl mendominasi Kawasan Perkotaan Belopa, sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan ini secara umum merupakan dataran rendah. Sementara itu ketinggian

antara 80 - 240 Mdpl hanya sebagian kecil, yaitu terdapat di Desa Lebani, Desa Kurusumanga, Desa Balubu, Desa Tampumia Radda, dan Desa Pasamai.

Kemiringan lereng Kawasan Perkotaan Belopa berkisar antara 0 - 40% keatas, kemiringan antara 0 - 15% umumnya mendominasi kawasan ini, yaitu berada di kawasan pesisir hingga sebagian wilayah dataran, sementara itu ketinggian 15 - 40% keatas hanya menempati beberapa bagian wilayah saja, seperti sebagian Desa Tampumia Radda, Desa Pasamai, Desa Balubu dan Desa Lebani.

3. Kondisi Kependudukan

Penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam perencanaan pembangunan. Selaku obyek, data kependudukan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perencanaan di masa mendatang. Estimasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan, sangat ditentukan oleh seberapa besar jumlah penduduk yang akan terlayani sarana dan prasarana tersebut.

a) Pertumbuhan Penduduk

Data jumlah penduduk Kota Belopa, kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk tahun awal (tahun 2011) yaitu Kecamatan Belopa sebanyak 10.850 jiwa, Kecamatan Belopa Utara sebanyak 11.634 jiwa, sedangkan pada tahun terakhir (tahun 2015) data jumlah penduduk meningkat, dimana di Kecamatan Belopa sebanyak 16.864 jiwa, dan Kecamatan Belopa Utara sebanyak 16.428 jiwa.

b) Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Belopa, pada dasarnya masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari luas wilayah yang mencapai 93,99 Km², sementara jumlah penduduk hanya berkisar 33.292 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya berkisar 758 jiwa/km². Jika dilihat perbandingan tingkat kepadatan pada 2 (dua) wilayah kecamatan di Kota Belopa, maka Kecamatan Belopa Utara memiliki tingkat kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Belopa. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan besaran masing-masing kepadatan penduduk di Kota Belopa, dirinci tiap desa/kelurahan di 2 (dua) wilayah kecamatan di Kota Belopa.

Tabel 4.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Belopa

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Kec. Belopa	16.864	59,26	285
	- Balubu	479	17,61	27
	- Pasamai	696	3,12	223
	- Senga Selatan	3.459	8,00	423
	- Senga	1.852	6,11	303
	- Belopa	3.605	4,54	607
	- Balo-balo	1.365	5,38	254
	- Kurrusumanga	1.266	7,20	176
	- Tanamanai	2.170	3,30	657
	- Tampumia Radda	1.972	4,00	493
2	Kec. Belopa Utara	16.428	34,73	473
	- Lebani	1.168	5,17	226
	- Pammanu	2.326	6,17	377
	- Lamunre	2.026	3,17	639
	- Lauwa	889	2,1	423
	- Paconne	749	2,14	350
	- Seppong	1.771	10,13	175
	- Sabe	4.125	3,52	1.172
	- Lamunre Tengah	3.374	2,33	1.448
	TOTAL	33.292	93,99	354

Sumber: RDTR Kota Belopa Tahun 2014

4. Klasifikasi Penggunaan lahan

Pola tutupan lahan di suatu kawasan merupakan wujud dari setiap kegiatan penduduk dalam pemanfaatan ruang, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara umum penggunaan lahan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penggunaan lahan budidaya (terbangun dan tak terbangun) dan penggunaan lahan non budidaya (lindung).

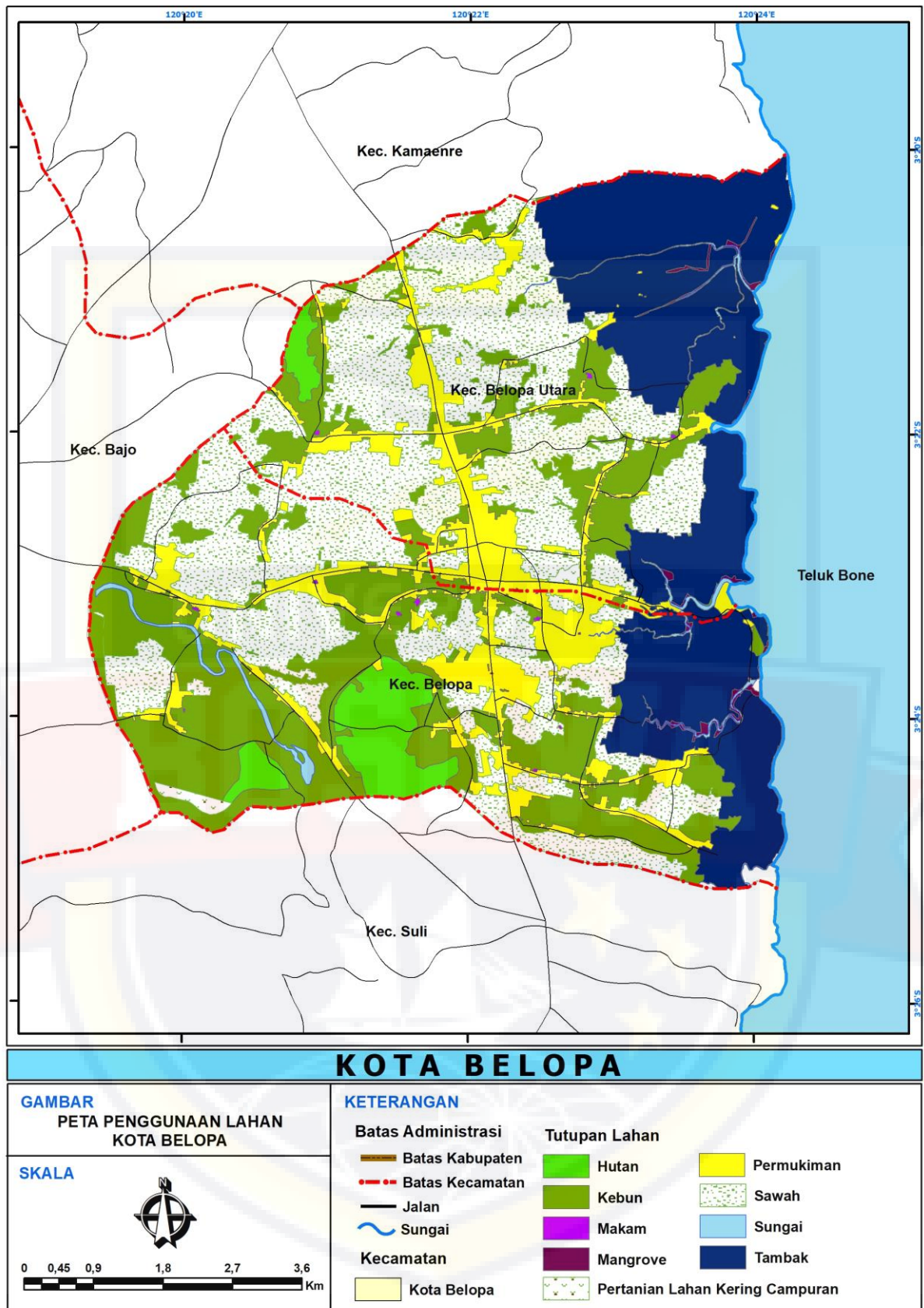
Selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. Jayadinata, (1999:54) mengemukakan bahwa tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota. Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan kawasan rekreasi.

Kota Belopa dengan luas 93,99 Km², dengan penggunaan lahan didominasi oleh sawah sebesar 2.055,76 Ha atau 35,51% dari keseluruhan wilayah. Luasan yang relatif besar lainnya digunakan sebagai lahan perkebunan sebesar 1.338,31 Ha atau 23,11%. Data penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Klasifikasi Tutupan Lahan di Kota Belopa

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan	214,33	3,73
2	Kebun	1.338,31	23,11
3	Makam	3,76	0,06
4	Mangrove	26,33	0,45
5	Permukiman	766,03	13,23
6	Pertanian Lahan Kering	15,25	0,26
7	Sawah	2.055,76	35,51
8	Tambak	1.369,39	23,65
Total luas		5.789,16	100,00

Sumber: RDTR Kota Belopa Tahun 2014



Gambar 4.3
Peta Penggunaan Lahan Kota Belopa

5. Prasarana Transportasi (Jaringan Jalan)

Jaringan jalan sangat berperan dalam memacu pertumbuhan Kawasan Perkotaan Belopa dalam pembentukan pola permukiman terkait dengan delimitasi kawasan terbangun dan estetika lingkungan serta interaksi antar lingkungan permukiman, sehingga dapat memudahkan penataan pola permukiman yang lebih teratur. Sistem jaringan transportasi merupakan urat nadi dalam pengembangan wilayah dan kota, peranan yang sangat penting diemban oleh sistem jaringan transportasi mengingat hampir semua sendi perekonomian masyarakat dan daerah sekarang bergantung pada kelancaran sistem transportasi yang ada sehingga perencanaan sistem transportasi merupakan hal yang sangat mendasar untuk menuju pembangunan kota yang berkelanjutan.

Jaringan jalan yang terdapat di Kawasan Perkotaan Belopa berdasarkan klasifikasi fungsinya terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal (lingkungan), dimana kondisi jalan yang ada yaitu jalan aspal, pengerasan dan jalan tanah. Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang dinamis dan berkelanjutan sangat dipengaruhi perkembangan sistem transportasi yang ada. Perkembangan sistem transportasi ini terwujud dalam jaringan jalan, membentuk pola-pola perkembangan kota di wilayah ini. Begitu juga dengan pola perkembangan yang terdapat di Kawasan Perkotaan Belopa, terbentuk dari pola-pola jaringan jalan yang ada.

C. Sanitasi Lingkungan Kota Belopa

1. Cakupan Pelayanan Sanitasi Kota Belopa

Cakupan penyehatan lingkungan merupakan banyaknya jumlah penduduk/kepala keluarga yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses terhadap sarana sanitasi. Gambaran cakupan sarana penyehatan lingkungan di Kota Belopa dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kota Belopa

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Sarana Sanitasi/KK	
			Leher Angsa	Cubluk
1.	Kec. Belopa	16.864	3.164	262
	- Balubu	479	785	-
	- Pasamai	696	145	14
	- Senga Selatan	3.459	225	11
	- Senga	1.852	257	19
	- Belopa	3.605	785	82
	- Balo-balo	1.365	119	6
	- Kurrusumanga	1.266	275	-
	- Tanamanai	2.170	343	65
	- Tampumia Radda	1.972	230	65
2.	Kec. Belopa Utara	16.428	2.342	182
	- Lebani	1.168	400	-
	- Pammanu	2.326	310	7
	- Lamunre	2.026	250	15
	- Lauwa	889	159	30
	- Paconne	749	65	78
	- Seppong	1.771	164	36
	- Sabe	4.125	472	-
	- Lamunre Tengah	3.374	522	16
	Total	33.292	5.506	444

Sumber: SSK Kota Belopa Th.2015

Berdasarkan tabel diatas cakupan pelayanan sanitasi di Kota Belopa, menggambarkan bahwa dari jumlah penduduk Kota Belopa pada tahun 2016 yang tercatat sebanyak 33.292 Jiwa, Jumlah kepala keluarga yang mempunyai akses

pelayanan sanitasi yang memenuhi syarat 5.506 KK, sedangkan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi 444 KK.



Gambar 4.4
Kondisi Hunian Masyarakat

2. Program SLBM di Kota Belopa

Sarana dan Prasarana pengelolaan limbah cair di Kota Belopa masih terbatas pada skala rumah tangga saja, Pembuangan limbah manusia menggunakan sarana berupa jamban keluarga, jamban jamak/MCK atau bentuk-bentuk sarana lainnya. Sedangkan pembuangan limbah rumah tangga masih dialirkan ke saluran drainase, tempat terbuka (sawah, kebun). Secara umum sistem penangan air limbah domestik yang digunakan di Kota Belopa yaitu sistem setempat (on site system).

Tabel 4.6
Sistem Penanganan Air Limbah Kota Belopa

No	Sistem	Kondisi Eksisting (%)	Target Pelayanan (%)		
			Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1.	Individual (Tangki Septik)	30%	45%	50%	68%
2.	Komunal (MCK, MCK++)	10%	30%	45%	55%

Sumber: SSK Kota Belopa Th.2015

Berdasarkan tabel diatas tahapan pengembangan SLBM di Kota Belopa, menggambarkan bahwa dari jumlah cakupan pelayanan 30% masyarakat yang menggunakan sistem individual (tangki septic) sedangkan masyarakat dengan cakupan pelayanan sistem komunal (MCK,MCK++) 10%.



Gambar 4.5
Kondisi Sarana
Sanitasi Masyarakat (MCK)

3. Kondisi Prasarana Sanitasi Di Kota Belopa

Kondisi sarana dan prasarana sanitasi di Kota Belopa sudah sangat mengkhawatirkan dilihat dari aspek kesehatan dan kebersihan, lingkungan sekitar pemukiman penduduk dapat dikatakan sudah tidak sehat lagi. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya fasilitas prasarana lingkungan yang memadai di lingkungan permukiman. Permasalahan tersebut jelas akan memperburuk kualitas lingkungan permukiman, karena keberadaan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan yang paling penting yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi/berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia dan merupakan syarat bagi terciptanya kenyamanan hunian.

Dalam memenuhi kebutuhan sanitasi pada umumnya masyarakat yang berada pada kawasan pesisir menggunakan air laut dengan kamar mandi yang tanpa dilengkapi fasilitas jamban/WC di rumahnya masing-masing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi, mereka menggunakan tegalan atau lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka, disamping ada sebagian lagi memanfaatkan daerah pantai sebagai fasilitas buang air besar. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas lingkungan di sekitarnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian masyarakat yang mampu telah mulai membuat kamar mandi dan WC di dalam rumah, namun mereka masih belum/tidak peduli akan kebersihan lingkungannya. Dari sejumlah rumah yang telah memiliki kamar mandi telah dilengkapi pula dengan fasilitas WC, hampir seluruh rumah menggunakan tipe closet jongkok, hampir tidak ditemui di rumah-rumah penduduk yang menggunakan tipe closet duduk, karena mereka merasa lebih nyaman menggunakan closet jongkok menurut pendapat mereka merasa lebih leluasa.



Gambar 4.6
Kondisi Pembuangan Limbah Rumah Tangga Masyarakat

D. Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini terdiri dari masyarakat berjumlah 68 KK dari populasi dan dari instansi pemerintah terkait dengan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat sebanyak 32 sehingga dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

- Masyarakat

Pada Tabel 4.7 dibawah ini memberi gambaran bahwa sebanyak 50 responden atau 70%, berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 18 responden atau 26% berjenis kelamin perempuan.

- Instansi Pemerintah

Pada Tabel 4.7 dibawah ini memberi gambaran bahwa sebanyak 20 responden atau 62%, berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 12 responden atau 38 % berjenis kelamin perempuan. Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7
Jenis Kelamin Responden

No.	Jawaban Responden	Masyarakat		Instansi Pemerintah	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	50	74.00	20	62.00
2	Perempuan	18	26.00	12	38.00
	Jumlah	68	100	32	100

Sumber : Hasil Analisis, 2015

2. Usia Responden

- Masyarakat

Tabel 4.8 memberi gambaran bahwa sebanyak 20 responden atau 33%, berusia 31-40 tahun, dan sebanyak 14 responden atau 21% berusia >50 tahun.

- Instansi Pemerintah

Tabel 4.8 memberi gambaran bahwa sebanyak 30 responden atau 94%, berusia 31-40 tahun, dan sebanyak 2 responden atau 6% berusia 41-50 tahun. Pembagian responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini :

Tabel 4.8
Usia Responden

No.	Usia Responden	Masyarakat		Instansi Pemerintah	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 20 tahun	-	0.00	-	0.00
2	21 - 30	15	23.00	-	0.00
3	31 - 40	20	33.00	30	94.00
4	41 - 50	15	23.00	2	6.00
5	> 50	14	21.00	-	0.00
	Jumlah	68	100	32	100

Sumber : Hasil Analisis, 2015

3. Tingkat Pendidikan Responden

- Masyarakat

Tabel 4.9 memberi gambaran bahwa sebanyak 30 responden atau 94%, berpendidikan SLTP, dan sebanyak 17 responden atau 25% berpendidikan SD.

- Instansi Pemerintah

Tabel 4.9 memberi gambaran bahwa sebanyak 32 responden atau 100%, berpendidikan Sarjana/S1. Pembagian responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Masyarakat		Instansi Pemerintah	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	17	25.00	-	0.00
2	SLTP	27	40.00	-	0.00
3	SLTA	24	35.00	-	0.00
4	D3	0	0.00	-	0.00
5	Sarjana/S1	0	0.00	32	100.00
	Jumlah	68	100	32	100

Sumber : Analisis Hasil, 2015

4. Jenis Pekerjaan Responden

Dari data hasil kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden diketahui bahwa responden dengan profesi sebagai nelayan menjadi responden terbesar, yakni sebanyak 50 responden 50%, responden yang pekerjaannya sebagai PNS/Pegawai Swasta sebanyak 32 responden atau 32%, dan responden yang pekerjaannya sebagai buruh bangunan sebanyak 18 responden atau 18%. Data pembagian responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini :

Tabel 4.10
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS/Peg.Swasta	32	32.00
2	Nelayan	50	50.00
3	Buruh Bangunan	18	18.00
	Jumlah	100	100

Sumber : Analisis Hasil, 2015

E. Deskripsi Responden Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program

Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa

Deskripsi responden terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat melalui jawaban kuesioner terhadap faktor/sub variabel peran serta masyarakat (keterlibatan masyarakat, karakteristik dan perilaku masyarakat), bentuk partisipasi masyarakat (tenaga, pikiran, keahlian, barang/material) dan tingkat partisipasi masyarakat (kehadiran dalam pertemuan, keterlibatan dalam kegiatan fisik, keaktifan dalam diskusi, keanggotaan dalam organisasi). Dalam analisa ini digunakan alat analisis statistik deskriptif dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk menghitung jumlah respon yang memiliki kelompok dengan nilai yang berbeda dari suatu variabel dan menggambarkan nilai tersebut dalam suatu persentase. Pembobotan (*scoring*) dengan menggunakan metode crosstabulation dilakukan setelah mendapatkan jawaban responden mengenai data yang disebar melalui kuesioner.

1. Keterlibatan Masyarakat

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11
Keterlibatan Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	17	25,00	85,00
2	Baik	23	33,82	92,00
3	Kurang Baik	18	26,48	54,00
4	Buruk	10	14,70	20,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	251

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 17 responden atau sebesar 25%, responden menilai baik berjumlah 23 responden atau 33,82%, responden menilai kurang baik berjumlah 18 responden atau 26,48%, dan responden menilai buruk berjumlah 10 responden atau 14,70%.

2. Karakteristik dan Perilaku Masyarakat

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Table 4.12 di bawah ini :

Tabel 4.12
Karakteristik dan Perilaku Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	10	14,71	50,00
2	Baik	15	22,06	60,00
3	Kurang Baik	25	36,76	75,00
4	Buruk	18	26,47	36,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	221

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 10 responden atau sebesar 14,71%, responden menilai baik berjumlah 15 responden atau 22,06%, responden menilai kurang baik berjumlah 25 responden atau 36,76%, dan responden menilai buruk berjumlah 18 responden atau 26,47%.

3. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Tenaga

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 4.13
Keterlibatan Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan Dalam Bentuk Tenaga

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	22	32,35	110,00
2	Baik	32	47,06	128,00
3	Kurang Baik	9	13,24	27,00
4	Buruk	5	7,35	10,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	275

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 22 responden atau sebesar 32,35%, responden menilai baik berjumlah 32 responden atau 47,06%, responden menilai kurang baik berjumlah 9 responden atau 13,24%, dan responden menilai buruk berjumlah 5 responden atau 7,35%.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Pikiran

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada table 4.14 di bawah ini :

Tabel 4.14
Keterlibatan Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan Dalam Bentuk Pikiran

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	2	2,94	10,00
2	Baik	18	26,47	72,00
3	Kurang Baik	43	63,24	129,00
4	Buruk	5	7,35	10,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	221

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 2 responden atau sebesar 2,94%, responden menilai baik berjumlah 18 responden atau 26,47%, responden menilai kurang baik berjumlah 43 responden atau 63,24%, dan responden menilai buruk berjumlah 5 responden atau 7,35%.

5. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Keahlian

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini :

Tabel 4.15
Keterlibatan Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan Dalam Bentuk Keahlian

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	10	14,71	50,00

2	Baik	15	22,05	60,00
3	Kurang Baik	33	48,53	99,00
4	Buruk	10	14,71	20,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	229

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 10 responden atau sebesar 14,71%, responden menilai baik berjumlah 15 responden atau 22,05%, responden menilai kurang baik berjumlah 33 responden atau 48,53%, dan responden menilai buruk berjumlah 10 responden atau 14,71%.

6. Keterlibatan Masyarakat dalam Bentuk Materi

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.16 di bawah ini :

Tabel 4.16
Keterlibatan Masyarakat
Terhadap Sanitasi Lingkungan Dalam Bentuk Materi

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat Baik	-	0,00	0
2	Baik	-	0,00	0
3	Kurang Baik	4	5,88	12,00
4	Buruk	64	94,12	128,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	140

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab kurang baik berjumlah 4 responden atau 5,88%, dan responden menilai buruk berjumlah 64 responden atau 94,12%.

7. Kehadiran dalam Pertemuan

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.17 di bawah ini :

Tabel 4.17
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Pertemuan

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat baik	10	14,71	50,00
2	Baik	20	29,41	80,00
3	Cukup baik	20	29,41	60,00
4	Buruk	10	14,71	20,00
5	Sangat buruk	8	11,76	8,00
Jumlah		68	100	218

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 10 responden atau sebesar 14,71%, responden menilai baik berjumlah 20 responden atau 29,41%, responden menilai cukup baik berjumlah 20 responden atau 29,41%, responden menilai buruk berjumlah 10 responden atau 14,71% dan responden menilai sangat buruk berjumlah 8 responden atau 11,76%.

8. Keterlibatan dalam Kegiatan Fisik

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.18 di bawah ini :

Tabel 4.18
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Kegiatan Fisik

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat baik	5	7,35	25,00
2	Baik	24	35,29	96,00
3	Cukup baik	30	44,12	90,00
4	Buruk	9	13,24	18,00
5	Sangat buruk	-	0,00	0
Jumlah		68	100	229

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 5 responden atau sebesar 7,35%, responden menilai baik berjumlah 24 responden atau 35,29%, responden menilai cukup baik berjumlah 30 responden atau 44,12%, dan responden menilai buruk berjumlah 9 responden atau 13,24%.

9. Keaktifan Dalam Diskusi

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini :

Tabel 4.19
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Keaktifan Dalam Diskusi

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai
1	Sangat baik	5	7,35	50,00
2	Baik	13	19,11	52,00
3	Cukup baik	30	44,12	90,00
4	Buruk	10	14,71	20,00
5	Sangat buruk	10	14,71	10,00
Jumlah		68	100	222,00

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 5 responden atau sebesar 7,35%, responden menilai baik berjumlah 13 responden atau 19,11%, responden menilai cukup baik berjumlah 30 responden atau 44,12%, responden menilai buruk berjumlah 10 responden atau 14,71% dan responden menilai sangat buruk berjumlah 10 responden atau 14,71%.

10. Keanggotaan dalam Organisasi

Data variabel keterlibatan masyarakat disebar kepada 68 responden masyarakat untuk mengetahui distribusi jawaban responden, distribusi jawaban responden dan pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4.20 di bawah ini :

Tabel 4.20
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Terhadap Keanggotaan Dalam Organisasi

No	Jawaban Responden	Masyarakat Setempat		
		Frekuensi	Persentase (%)	Nilai

1	Sangat baik	7	10,30	35,00
2	Baik	7	10,30	28,00
3	Cukup baik	20	29,41	60,00
4	Buruk	29	42,64	58,00
5	Sangat buruk	5	7,35	5,00
Jumlah		68	100	186

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa responden yang menjawab sangat baik 7 responden atau sebesar 10,30%, responden menilai baik berjumlah 7 responden atau 10,30%, responden menilai cukup baik berjumlah 20 responden atau 29,41%, responden menilai buruk berjumlah 29 responden atau 42,64% dan responden menilai sangat buruk berjumlah 5 responden atau 7,35%.

Untuk lebih mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil kuesioner yang di lakukan dengan menggunakan metode crosstabulation maka hasil rekapitulasinya dapat dilihat pada Tabel 4.21 dibawah ini :

Tabel 4.21
Rekapitulasi Efektivitas
Pelaksanaan Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa

No.	Variabel	Indikator	Nilai hasil Crosstab (%)	Standar Nilai Pengaruh	Nilai Bobot	Kesimpulan
1.	Peran serta masyarakat	Keterlibatan masyarakat	92,00	88,87 – 100	5	Sangat Efektif
		Karakteristik dan perilaku masyarakat	75,00	66.67-88,88	4	Efektif
2	Bentuk partisipasi	Tenaga	128,00	88,87 – 100	5	Sangat Efektif

No.	Variabel	Indikator	Nilai hasil Crosstab (%)	Standar Nilai Pengaruh	Nilai Bobot	Kesimpulan
3	Tingkat partisipasi	Pikiran	129,00	88,87 – 100	5	Sangat Efektif
		Keahlian	99,00	88,87 – 100	5	Sangat Efektif
		Barang/material	60,00	44,45-66,66	3	Kurang Efektif
		Kehadiran dalam rapat	60,00	44,45-66,66	4	Kurang Efektif
		Keterlibatan dalam kegiatan fisik	100,00	88,87 – 100	5	Sangat Efektif
		Keaktifan dalam diskusi	60,00	44,45-66,66	3	Kurang Efektif
		Keanggotaan dalam organisasi	60,00	44,45-66,66	3	Kurang Efektif

Sumber : Hasil Analisis 2015

Dari hasil rekapitulasi hasil analisis berdasarkan beberapa indikator yang ditampilkan pada Tabel 4.21 di atas di tarik kesimpulan, maka di ketahui efektivitas pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Belopa adalah keterlibatan masyarakat, karakteristik dan perilaku masyarakat, tenaga, pikiran, keahlian dan keterlibatan dalam kegiatan fisik.

Dalam temuan peneliti kondisi yang berkembang di lapangan bahwa pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Belopa sudah berjalan efektif dari sisi peran serta masyarakat dalam hal keterlibatan secara langsung dalam proses penyelenggaraan program sanitasi lingkungan dan

bentuk partisipasi yang diberikan sudah cukup efektif dalam bentuk tenaga, pikiran, serta keahlian masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet, (1994) yang menyatakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: (1) partisipasi melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, (2) pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan, dan (3) pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.

Sedangkan pada tingkatan partisipasi masyarakat belum berjalan efektif dalam hal ini masyarakat sebagai penerima manfaat dari program sanitasi lingkungan belum memberikan konstribusi positif pada setiap kehadiran dalam rapat, keaktifan dalam diskusi dan keanggotaan dalam organisasi. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Henry Sanoff (2000) yang menyatakan tujuan dari partisipasi/pelibatan masyarakat dalam pembangunan adalah : (1) Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, (2) Untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyampaikan suara/aspirasinya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tujuan supaya rencana, keputusan dan pelaksanaan yang dijalankan dapat diterima dengan baik, dan (3) Untuk meningkatkan rasa memiliki dalam masyarakat dengan mengumpulkan orang-orang yang akan saling membagi ide/tujuan yang sama.

F. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program

Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa

Untuk penilaian variabel sebagai data yang digunakan dalam mengukur pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan di dasarkan pada kondisi lingkungan, ketersediaan prasarana, serta aspirasi dan motivasi. Berdasarkan data yang diperoleh gambaran tingkat pengaruh dalam lokasi penelitian yang di dasarkan pada standar kelayakan untuk memperoleh gambaran derajat tingkat pengaruh.

Selanjutnya dari hasil analisis penilaian dengan menggunakan analisis korelasi akan di dapatkan faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap hubungan variabel yang ditinjau dari data yang diperoleh sehingga dijadikan dasar dalam menilai variabel yang telah di nilai. Adapun variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan Tabel 4.22 berikut:

Tabel 4.22
Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan
Program Sanitasi Lingkungan

No.	Variabel			
	Program Sanitasi Lingkungan	Kondisi Lingkungan (X ₁)	Ketersediaan Prasarana (X ₂)	Aspirasi dan Motivasi (X ₃)
1.		3	5	1
Jumlah		3	5	1

Sumber : Hasil Analisis 2015

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan korelasi antara variabel Y (Program Sanitasi Lingkungan) dengan variabel X₁ (Kondisi Lingkungan), X₂ (Ketersediaan Prasarana), X₃ (Aspirasi dan Motivasi).

Berdasarkan hasil uji korelasi maka diperoleh ranking masing-masing pada Tabel 4.23 dibawah ini:

Tabel 4.23
Skor Korelasi Masing-masing Variabel

No.	Variabel Yn.Xn	Nilai Hasil Uji Korelasi	Nilai	Kesimpulan
1.	Kondisi Lingkungan	0,42	3	Sedang
2.	Ketersediaan Prasarana	0,81	5	Sangat Kuat
3	Aspirasi dan Motivasi	0,20	1	Sangat Rendah

Sumber : Hasil Analisis 2015

Dalam temuan peneliti kondisi yang berkembang di lapangan terkait pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan bahwa kultur, tradisi dan lingkungan telah membuat masyarakat lebih memilih profesi bekerja sebagai nelayan dari pada yang lain. Kondisi ini di dukung pula oleh rendahnya tingkat pendidikan membuat tak ada alternatif lain selain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya hal ini berpengaruh pada kurangnya pemahaman akan program, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soetrisno (2004) beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: (1) Pengetahuan dan keahlian, (2) Pekerjaan masyarakat, (3) Tingkat pendidikan, (4) Jenis kelamin, (5) Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mencanangkan upaya penyediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman berbasis masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kebutuhan, merupakan suatu gagasan ide baru dalam perubahan pembangunan. Sosialisasi di tingkat pemerintah provinsi

dan kabupaten/kota yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi awal guna menumbuhkan pemahaman awal bagi para stakeholder.

Upaya yang perbaikan sanitasi lingkungan diberikan kesiapan pendanaan pembangunan MCK itu sendiri sesuai kesepakatan yang dituangkan di MOU awal. Tidak hanya menyediakan dana pemberdayaan masyarakat sebesar 15% dari total biaya penyediaan MCK tersebut, tetapi juga memberikan pelatihan dan pembinaan dibidang pembangunan fisik, pengelolaan dan pemeliharaan MCK nantinya setelah terbangun. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak konsultan pendamping ini, dimulai dari memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan program secara transparan, menentukan lokasi yang terpilih secara musyawarah dan mufakat antar sesama warga. Begitu juga dalam proses pelaksanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan MCK, sesuai dengan pendekatan partisipasi masyarakat bahwa peran pemerintah sebagai *enabler*.

G. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepedulian Masyarakat Dalam Program Sanitasi Lingkungan Di Kota Belopa

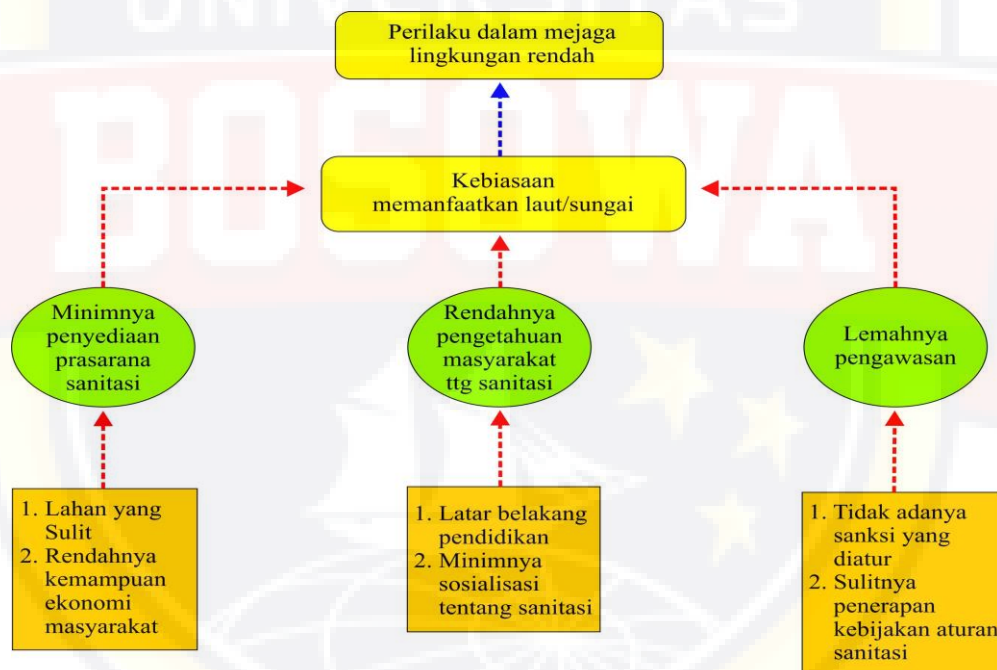
Kepedulian masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri, dan perilaku masyarakat tidak timbul dengan sendirinya, tetapi akibat adanya stimulus yang diterima. Stimulus ini akan berbeda responnya pada setiap orang sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui faktor kepedulian masyarakat dalam program sanitasi lingkungan, akan dilihat dari faktor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat sebelum program sanitasi lingkungan dan sesudah program sanitasi.

1. Sebelum Ada Program Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Menurut teori Walgito (2004), bahwa pembentukan perilaku seseorang dibentuk dengan kebiasaan (*conditioning*), dengan pengertian (*insight*) dan dengan pencontohan (*voluntary*). Perilaku masyarakat di Kota Belopa sebelum adanya program sanitasi lingkungan dibentuk dengan kebiasaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terlihat pada Gambar 4.7, berikut ini:

Sumber : Hasil Analisis 2015

Gambar 4.7
Diagram Faktor yang Mempengaruhi



Keterangan :

---> Di bentuk oleh

---> Di pengaruhi oleh

Kebiasaan Masyarakat

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, masyarakat akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, begitu juga hal dengan masyarakat yang bermukim dibantaran sungai dan di wilayah pesisir cenderung akan berinteraksi

dengan lingkungan sungai dan laut itu sendiri. Rutinitas dalam menggunakan sungai dan laut sebagai tempat beraktivitas sehari-hari akhirnya menjadi kebiasaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terbentuk karena kebiasaan. Hal ini akan memperlihatkan bahwa antara kebiasaan dan pencontohan serta pengertian di masyarakat sangat berhubungan erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut antara lain :

a) Minimnya Penyediaan Prasarana Sanitasi

Kebiasaan memanfaatkan sungai sebagai tempat beraktivitas didorong oleh kondisi fisik lingkungan yang tidak layak, dimana minimnya penyediaan prasarana sanitasi lingkungan berkaitan dengan kondisi lahan yang sulit, apakah penyediaan itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Hal ini akan mendukung kebiasaan masyarakat tadi untuk terus memanfaatkan sungai sebagai sarana dan prasarana mereka dalam beraktivitas sehari-harinya. Menurut Komaruddin (1997), salah satu ciri dari lingkungan permukiman kumuh ditandai dengan buruknya prasarana sanitasi lingkungannya. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat menjadi pendorong kebiasaan masyarakat berperilaku tidak ramah lingkungan tadi. Mereka tidak memiliki kemampuan lebih untuk menyediakan prasarana sanitasi tersebut di rumah masing-masing, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit.

b) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Sanitasi

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan sanitasi lingkungan sangat rendah. Ini dapat dipahami karena latar belakang

pendidikan masyarakat. Yang berarti bahwa kemampuan masyarakat untuk memahami arti pentingnya sanitasi lingkungan itu sangat rendah. Disamping itu penyuluhan tentang sanitasi lingkungan yang disampaikan kepada masyarakat secara umum hanya membicarakan tentang menjaga kebersihan saja, misalnya buang sampah pada tempatnya. Tetapi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan terkait masalah kesehatan air, dan penanganan limbah rumah tangga masih jarang sekali dilakukan. Tidak semua masyarakat mengetahui tentang sanitasi yang sebenarnya baik.

c) Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan terkait kebiasaan memanfaatkan sungai karena umumnya di Kota Belopa sendiri peraturan tentang pelarangan penggunaan sungai dan laut sebagai prasarana sanitasi belum ada. Hal ini sangat menyulitkan dalam menetapkan kebijakan karena adanya pertimbangan sosial tadi. Ditambah lagi intervensi dari pihak pemerintah belum ada sama sekali. Intervensi ini dapat berupa peraturan atau sanksi dan juga pengawasan baik itu dari aparat pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

2. Sesudah Ada Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Sejak terbangunnya sarana MCK ++ di Kota Belopa kebiasaan masyarakat mengalami perubahan, ditandai dengan aktivitas MCK masyarakat tidak lagi ke sungai dan laut, lingkungan juga sudah mulai bersih. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti terlihat pada Gambar 4.8, terlampir.

Kebiasaan seseorang memanfaatkan sungai sebagai tempat MCK sehari-hari dapat berubah bila dia mengetahui dan memahami dampak buruk yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Kebiasaan itu juga akan berubah bila dia melihat sendiri tentang sesuatu hal baru yang berbeda dari kebiasaannya. Diawali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sanitasi serta tindakan nyata dengan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, akan membentuk suatu kesadaran yang tinggi bahwa sarana yang terbangun adalah kebutuhan hidup yang paling utama.

Gambar 4.8



Sumber : Hasil Analisis 2015

Faktor Pendorong Masyarakat Mengelola dan Memanfaatkan Sarana Sanitasi

a) Dorongan Pemerintah dan Swasta

Kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kadang kala terbentur dengan permasalahan pembiayaan, sehingga sangat dibutuhkan dukungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi sarana dan prasarana dasar masyarakat itu, dibentuklah sistem pembiayaan kerjasama atau sharing dana antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini memungkinkan penyediaan fasilitas pelayanan umum tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan dapat segera dimanfaatkan. Dengan adanya pembiayaan untuk pembangunan MCK tersebut dan dengan pola pelaksanaan yang partisipatif mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Munculnya kesadaran tadi juga diakibatkan oleh adanya sedikit paksaan agar mau merubah kebiasaan, karena mau tidak mau masyarakat yang sudah terbiasa memanfaatkan sungai dan laut sebagai tempat MCK mereka, dihimbau atau didorong untuk memanfaatkan sarana yang sudah terbangun yang salah satunya adalah MCK. Otomatis dengan keberadaan bangunan MCK tadi, kebutuhan mereka untuk mandi, mencuci dan lain-lainnya sudah terpenuhi.

b) Adanya Kemauan dan Minat

Adanya pengetahuan baru tentang pentingnya menjaga sanitasi lingkungan dan adanya pengetahuan tentang sanitasi yang ramah lingkungan melalui sistem IPAL dan dorongan dari pemerintah dan swasta yang diperoleh masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi bahkan dukungan finansial serta melibatkan

masyarakat dalam proses awal penyediaan sarana sanitasi itu sendiri. Memunculkan keinginan dan kemauan yang memotivasi masyarakat untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mereka lakukan. Sebagaimana bahwa pengetahuan yang mereka peroleh menimbulkan niat dihati mereka untuk berubah. Kemudian mencoba untuk mau melaksanakan pola hidup yang sehat sesuai dengan yang dianjurkan.

c) Adanya Kontrol Sosial

Pentingnya sanitasi lingkungan yang baik yang sudah dipahami oleh masyarakat dari penyuluhan dan adanya contoh yang ditiru, memunculkan rasa takut dan was-was pada diri masyarakat. Perasaan ini muncul karena tidak mau nanti dianggap sebagai perusak sarana sanitasi tadi. Rasa was-was antar sesama masyarakat inilah yang menjadi pengontrol dalam memanfaatkan sarana MCK. Ketakutan akan dihakimi sesama masyarakat pengguna menjadi semacam sanksi bila seandainya nanti seseorang melakukan kesalahan sedikit saja akan berdampak kepada masyarakat pengguna lainnya.

H. Sintesis Hubungan Antara Peran Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Perbaikan sanitasi lingkungan tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari pelaku yang melakukan suatu kegiatan yang didorong oleh berbagai hal dengan konsistensi hubungan antara pelaku yang baik. Hubungan antara pelaku, kegiatan dan motivasinya akan menggambarkan ada atau tidaknya mempengaruhi

perbaikan sanitasi lingkungan tadi. Pengaruh peran masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan seperti terlihat pada Tabel 4.24 berikut :

Tabel. 4.24
Indikator Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam
Perbaikan Sanitasi Lingkungan

Aspek/Variabel	Sangat Berpengaruh	Berpengaruh	Cukup Berpengaruh	Kurang Berpengaruh
Kondisi Lingkungan	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam proses inisiasi awal, perencanaan, pembangunan, • Terlibat dalam proses inisiasi awal, pemeliharaan dan pengawasan 	-
Ketersediaan Prasarana	Berperan dalam beberapa tahapan sebagai pemberdayaan, pendampingan, penguatan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan	Berperan dalam beberapa tahapan pendampingan, penguatan, dan atau hanya sebagai pekerja dan pengguna saja	-	-
Aspirasi dan Motivasi	-	-	-	Motivasinya hanya alasan ekonomi karena ada upah yang diterima apabila ikut terlibat.

Sumber : Hasil Analisis 2015

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses perbaikan sanitasi lingkungan di Kota Belopa terjadi akibat adanya perubahan perilaku yang selama

ini dalam prakteknya kurang ramah pada lingkungan. Perubahan perilaku ini tidak terjadi dengan sendirinya, menurut Walgito (2004) perilaku masyarakat dapat dibentuk sesuai dengan harapan melalui kebiasaan, pengertian, dan pencontohan. Sejalan dengan teori tersebut, perilaku masyarakat di Kota Belopa adanya pencontohan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi keberlanjutan peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu dorongan pemerintah dalam memotivasi masyarakat untuk turut berperan serta dalam perbaikan sanitasi lingkungan. Paradigma pembangunan berkelanjutan merubah perspektif pembangunan yang selama ini bersifat *top down* berubah menuju *bottom up*, dicanangkan pemerintah melalui kebijakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berbasis masyarakat dengan mengedepankan pendekatan kebutuhan. Upaya yang dilakukan sejalan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan antar stakeholder dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kota Belopa” maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Belopa belum berjalan efektif dari sisi tahapan kegiatan yang ada antara lain : kehadiran dalam rapat, keaktifan dalam diskusi, dan keanggotaan dalam organisasi. Masyarakat hanya diinformasikan tetapi belum mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan dan belum menampakkan adanya kemandirian dalam pembangunan serta perencanaan oleh masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat di Kota Belopa lebih dipengaruhi oleh masyarakat hanya berperan dalam beberapa tahapan pendampingan, penguatan, dan sebagai pekerja atau pengguna saja serta kecenderungan masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi karena adanya alasan ekonomi apabila ikut terlibat. Proses terjadinya fenomena tersebut merupakan mata rantai sebab-akibat proses interaksi manusia dan lingkungannya. Keragaman pengetahuan

masyarakat tentang sanitasi lingkungan terdiri dari latar belakang sosial ekonomi, dan kurangnya informasi tentang sanitasi lingkungan.

3. Untuk implementasi program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat tentunya diperlukan koordinasi serta kerjasama berbagai sektor mulai dari pemerintah (antara Dinas terkait) maupun kerjasama yang baik di tingkat masyarakat, namun kenyataannya hal ini sering tidak berjalan dengan baik karena masing-masing stakeholder memiliki kepentingan masing-masing, yang tidak jarang mengesampingkan kepentingan sektor lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang mungkin bermanfaat bagi “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Di Kota Belopa” sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintahan

Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan, khususnya terhadap prasarana sanitasi diharapkan dapat terus berjalan dan berkelanjutan juga, tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan, namun diharapkan sampai dengan tahap pemeliharaan dan pengawasan untuk menjamin terpeliharanya fungsi-fungsi prasarana yang sudah terbangun.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Dalam penelitian yang akan mengambil objek yang sama perlu melakukan kajian mengenai dampak lingkungan akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- b. Dalam penelitian yang akan datang perlu mengkaji lebih mendalam Menggali kebiasaan masyarakat terkait dengan kebersihan lingkungan (budaya gotong-royong versi masyarakat setempat) berpedoman pada konsep pembangunan berbasis masyarakat yang menitikberatkan pada posisi masyarakat sebagai mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta
- Artiningsih. 2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Bryant, Carolie dan White, Louise G. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES.
- Entjang Indan, 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Akhmad Sudrajat, 2008. *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran*
- Gunawan Indra, 2006. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang
- Hamdi, Nabeel dan Goethe, Reinhard, 1997. *Action Planning for Cities. A Guide to community practice*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Komarudin, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman Yayasan Realestatet Indonesia*.
- Ratnawati Beata, 2012. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Batang (Studi Kasus Desa Sodong Kec. Wonotunggal, Dan Desa Mojotengah Kec. Reban)* Tesis Universitas Diponegoro Semarang
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Rusmanto Joni, 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Rukmana, Nana, 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Jakarta PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

- Sadyohutomo, 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah*, Penerbit PT Bumi Aksara
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siregar J Tety, 2010. *Kepedulian Masyarakat dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Matahalasan Kota Tanjungbalai*, Tesis Universitas Diponegoro
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Surotinojo Ibrahim, 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi oleh Masyarakat di Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta Bandung
- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tarigan, Robinson, 2004. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Jakarta, Penerbit: PT. Bumi Aksara
- Theresia, Krishna, Andini, Nugraha, Mardikanto, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Penerbit : ALFABETA
- Pranata Utama, 2012. *Analisis Keberlangsungan Pengelolaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi (Pasca WSLIC-2) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Karangsono-Kabupaten Malang*. Tesis Universitas Indonesia
- Prasetyo, 2013. *Konsep dan Teori Partisipasi Masyarakat*. Artikel Online. (<https://prafapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>)
- Walgitto Bimo, 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi
- Zubaedi, 2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta



**LAMPIRAN
DAFTAR KUESIONER**

KUESIONER RESPONDEN (MASYARAKAT)

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut bapak/ibu/saudara dengan memberi tanda silang (X)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :tahun
4. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
5. Pendidikan : a. Tamat SD b. Tamat SLTP
c. Tamat SLTP d. Tamat Akademik
e. Tamat Sarjana S1
6. Berapakah rata-rata pengeluaran/belanja rumah tangga saudara dalam sehari?
a. Sebutkan, Rp.....?
7. Berapa jumlah anggota keluarga saudara?
a. Sebutkan,orang
8. Apakah saudara mengetahui tentang program sanitasi lingkungan?
a. Sangat tahu
b. Sudah tahu
c. Cukup tahu
d. Kurang tahu
e. Tidak tahu
9. Sebelum dibangunnya prasarana sanitasi lingkungan, dimana saudara melakukan aktivitas mandi cuci kakus (MCK)?
a. Di WC rumah
b. Di pantai
c. Saluran drainase
d. Pekarangan rumah
e. Di tempat lainnya, sebutkan.....?

10. Apakah saudara ikut terlibat dalam program sanitasi lingkungan?
- Selalu ikut
 - Sering
 - Cukup sering
 - Jarang ikut
 - Tidak pernah ikut
11. Apa yang mendorong saudara terlibat dalam program sanitasi lingkungan?
- Karena ingin MCK di tempat yang lebih bagus dan bersih
 - Karena ikut-ikutan
 - Karena diajak orang lain
 - Karena mendukung program SANITASI LINGKUNGAN
 - Lainnya, sebutkan.....

B. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

- Bentuk partisipasi yang saudara berikan dalam program sanitasi lingkungan?
 - Tenaga
 - Pikiran
 - Keahlian
 - Barang/material
 - Uang
- Apakah saudara mengetahui penggunaan dana dalam program sanitasi lingkungan?
 - Sangat tahu
 - Sudah tahu
 - Cukup tahu
 - Kurang tahu
 - Tidak tahu
- Darimana sumber dana terbesar untuk biaya pemeliharaan dan perawatan fasilitas prasarana sanitasi lingkungan?
 - Sumbangan warga
 - Pemerintah daerah
 - Pengurus
 - Iuran pengguna

- e. Tidak ada
4. Apakah ada pertemuan/musyawarah warga dalam membicarakan program pembangunan dan pemeliharaan prasarana sanitasi lingkungan, jika ada berapa kali diadakan?
- Ya, > sekali sebulan
 - Ya, Sekali sebulan
 - Ya, 1 s/d 3 bulan sekali
 - Ya, Lebih dari 3 bulan sekali
 - Tidak ada pertemuan
5. Bagaimana frekuensi kehadiran saudara dalam pertemuan untuk membicarakan tentang program sanitasi lingkungan:
- Selalu hadir (12 kali pertemuan)
 - Sering hadir (9 kali pertemuan)
 - Cukup sering (6 kali pertemuan)
 - Jarang hadir (3 kali pertemuan)
 - Tidak pernah hadir
6. Apakah saudara mengikuti kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sanitasi lingkungan?
- Selalu ikut
 - Sering
 - Cukup sering
 - Jarang mengikuti
 - Tidak pernah ikut
7. Selama anda terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sanitasi lingkungan, bagaimana perasaan saudara?
- Sangat senang
 - Agak senang
 - Kurang senang
 - Terpaksa
 - Sangat terpaksa

8. Bagaimana keaktifan saudara dalam mengikuti kegiatan diskusi terkait program sanitasi lingkungan?
- Selalu ikut
 - Sering
 - Cukup sering
 - Jarang mengikuti
 - Tidak pernah ikut
9. Bagaimana tingkat keaktifan berdiskusi saudara dalam pertemuan?
- Sangat tinggi
 - Tinggi
 - Cukup tinggi
 - Rendah
 - Sangat rendah
10. Kapan waktu yang saudara sediakan untuk ikut kegiatan pertemuan yang membicarakan tentang program sanitasi lingkungan?
- Setiap waktu
 - Setelah pulang kerja
 - Kalau ada jadwal bertugas
 - Kalau ada waktu senggang
 - Kalau lagi senang
11. Organisasi apa saja yang ada di lingkungan saudara selain KSM?
- Koperasi/yayasan
 - PKK/dasawisma
 - Pengajian/majlis taklim
 - Organisasi lainnya, sebutkan.....
 - Tidak ada
12. Apakah saudara sering mengikuti dalam kegiatan organisasi selain KSM tersebut:
- Selalu ikut
 - Sering
 - Cukup sering
 - Jarang mengikuti

- e. Tidak pernah ikut

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat

1. Bagaimana kondisi pengelolaan sanitasi lingkungan sekarang ini:
 - a. Sangat aktif karena kegiatan berjalan rutin dan giat diadakan
 - b. Aktif karena kegiatan berjalan secara periodik dan sering diadakan
 - c. Cukup aktif karena kegiatan berjalan seperti biasa
 - d. Kurang aktif karena kegiatan berjalan tidak menentu
 - e. Tidak aktif lagi
2. Darimanakah lahan lokasi pembangunan prasarana sanitasi lingkungan?
 - a. Sumbangan Pemda/tanah negara
 - b. Pemberian/wakaf dari masyarakat
 - c. Dibeli oleh masyarakat
3. Apakah lokasi prasarana sanitasi yang dibangun dengan program sanitasi lingkungan menurut anda sudah tepat?
 - a. Sangat tepat
 - b. Sudah tepat
 - c. Cukup tepat
 - d. Kurang tepat
 - e. Tidak tepat
4. Menurut saudara, apakah prasarana sanitasi lingkungan yang telah dibangun tersebut sudah memberikan manfaat langsung bagi saudara?
 - a. Sangat bermanfaat
 - b. Bermanfaat
 - c. Cukup bermanfaat
 - d. Kurang bermanfaat
 - e. Tidak bermanfaat
5. Apa manfaatnya bagi saudara dengan adanya prasarana ini?
 - a. Memudahkan dalam MCK
 - b. Mengurangi biaya untuk pembangunan/pemeliharaan MCK keluarga
 - c. Lingkungan lebih bersih
 - d. Lebih ramai

- e. Bisa ketemu banyak orang
6. Apakah prasarana yang dibangun saat ini berfungsi atau tidak?
- Sangat berfungsi
 - Berfungsi
 - Cukup berfungsi
 - Kurang berfungsi
 - Tidak berfungsi
7. Apa kedudukan saudara di dalam program sanitasi lingkungan?
- Pengurus KSM
 - Anggota tim pengelola
 - Anggota biasa KSM
 - Tidak menjadi anggota
 - Hanya pengguna
8. Apakah saudara mengetahui sebelumnya tentang sosialisasi program sanitasi lingkungan?
- Sangat tahu
 - Sudah tahu
 - Cukup tahu
 - Kurang tahu
 - Tidak tahu
9. Menurut saudara, dalam kegiatan program sanitasi lingkungan warga banyak dipengaruhi oleh?
- Keinginan Masyarakat
 - Pemerintah daerah
 - Pengurus desa/dusun
 - Tokoh Masyarakat
 - Konsultan Sanitasi Lingkungan

I. KUESIONER RESPONDEN (PEMERINTAH/LEMBAGA MASYARAKAT)

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut bapak/ibu/saudara dengan memberi tanda silang (X)

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Instansi/Lembaga :.....
4. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
6. Bagaimana peran pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program sanitasi lingkungan?
 - a. Sangat bagus karena sangat aktif mengajak masyarakat
 - b. Bagus karena aktif mengajak masyarakat
 - c. Cukup bagus karena cukup aktif mengajak masyarakat
 - d. Kurang bagus karena kurang aktif mengajak masyarakat
 - e. Tidak bagus karena tidak aktif mengajak masyarakat
7. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan penjelasan tentang program sanitasi lingkungan?
 - a. Langsung memberikan penjelasan tanpa diminta
 - b. Diminta dulu, baru memberikan penjelasan
 - c. Kadang-kadang memberikan penjelasan, bila diminta
 - d. Kurang memberikan penjelasan
 - e. Tidak pernah memberikan penjelasan
8. Bagaimana peran pengurus desa/dusun untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program sanitasi lingkungan?
 - a. Sangat bagus karena sangat aktif mengajak masyarakat
 - b. Bagus karena aktif mengajak masyarakat
 - c. Cukup bagus karena cukup aktif mengajak masyarakat
 - d. Kurang bagus karena kurang aktif mengajak masyarakat
 - e. Tidak bagus karena tidak aktif mengajak masyarakat

9. Bagaimana peran pengurus desa/dusun dalam memberikan penjelasan tentang program sanitasi lingkungan?
- Sangat bagus dalam memberikan penjelasan
 - Bagus dalam memberikan penjelasan
 - Cukup bagus dalam memberikan penjelasan
 - Kurang bagus dalam memberikan penjelasan
 - Tidak bagus dalam memberikan penjelasan
10. Bagaimana peran toko masyarakat/adat untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program sanitasi lingkungan?
- Sangat bagus karena sangat aktif mengajak masyarakat
 - Bagus karena aktif mengajak masyarakat
 - Cukup bagus karena cukup aktif mengajak masyarakat
 - Kurang bagus karena kurang aktif mengajak masyarakat
 - Tidak bagus karena tidak aktif mengajak masyarakat
11. Siapakah yang mengajukan jumlah/besar iuran pengguna sanitasi lingkungan?
- Aparat pemerintah
 - Pengurus KSM
 - Konsultan TFL
 - Usulan masyarakat
 - Lainnya, sebutkan?
12. Bagaimana masukan usulan saudara dalam pertemuan tentang sanitasi lingkungan?
- Sering diterima
 - Sering dipertimbangkan
 - Sering didengar
 - Kurang didengar
 - Tidak didengar
13. Apakah dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama?
- Sangat sesuai
 - Sesuai
 - Cukup sesuai

- d. Tidak sesuai
- e. Sangat tidak sesuai

14. Darimanakah sumber dana terbesar dalam pemeliharaan prasarana sanitasi program sanitasi lingkungan?

- a. Kontribusi masyarakat
- b. Bantuan pemerintah
- c. Sisa dana pembangunan fisik prasarana
- d. Bantuan dari sponsor/NGO
- e. Tidak tahu

15. Bagaimana saudara menyikapi setiap pertanggungjawaban/pelaporan kegiatan yang dilakukan?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju